

# **BERITA NEGARA** REPUBLIK INDONESIA

No. 466, 2020

BKKBN. RENSTRA. Tahun

2020-2024.

Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 **TENTANG** 

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2020-2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melaksanakan program dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang dituangkan dalam rencana Badan strategis Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - b. melaksanakan rencana strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024, perlu menyesuaikan kebijakan anggaran yang berorientasi pada program dan kegiatan prioritas guna mencapai tujuan pembangunan nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62)
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  - 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
- 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TAHUN 2020-2024.

#### Pasal 1

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra BKKBN adalah dokumen perencanaan yang memuat mandat/tugas dan fungsi, kewenangan, peran, perkembangan kondisi/isu strategis, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

#### Pasal 2

Renstra BKKBN berlaku sebagai panduan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program, kebijakan dan kegiatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2020- 2024.

#### Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumenRenstra BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

- (1) Renstra BKKBN memuat:
  - a. kondisi umum serta potensi dan permasalahan;
  - visi, misi dan tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - c. sasaran strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - d. arah kebijakan dan strategi nasional;
  - e. arah kebijakan dan strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - f. kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
  - g. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
  - h. matrik kinerja dan matrik kerangka regulasi.
- (2) Renstra BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 5

Renstra BKKBN dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan:

- a. rencana strategis unit kerja eselon I dan rencana strategis unit kerja eselon II;
- b. penyusunan rencana kerja tahunan;

- c. penyusunan struktur program dan anggaran tahunan beserta rancangan detail kegiatan;
- d. penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- e. sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan, serta sinkronisasi/integrasi Program Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaatau program Bangga Kencana, baik antara pemerintah pusatdan pemerintah daerah provinsi,kabupaten, dan kota, maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1441), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

#### HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2020-2024

# BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Kondisi Umum

#### A. Latar Belakang

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan memiliki untuk melaksanakan Keluarga, tugas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Akhir tahun 2019 BKKBN mengemas dan memperkenalkan istilah Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangga Kencana. Perubahan nama dari KKBPK menjadi Bangga Kencana tersebut bertujuan untuk memudahkan penyebutan program, yang seringkali agak sulit untuk diucapkan. Peletakan kata Pembangunan Keluarga di depan menunjukan bahwa BKKBN merupakan lembaga yang ingin memberikan manfaat kepada seluruh keluarga Indonesia. Selain itu, BKKBN harus dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik atau mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara terhadap 2 (dua) dari (tujuh) langsung agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk "Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing", serta mendukung "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan". Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

- Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP;
   Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan 2)
   Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.
- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP;
   Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Sedangkan pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, BKKBN memiliki peran pada PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP pada Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter.

Sebagai penjabaran agenda pembangunan (PN) beserta PP dan KP sebagaimana diatas, disusunlah Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 yang secara umum digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun di dalam Renstra BKKBN 2020-2024 dapat diimplementasikan dengan

baik diseluruh tingkatan wilayah, maka dokumen ini dilengkapi dengan indikator-indikator, baik Indikator Sasaran Strategis (ISS) BKKBN, Indikator Program/Indikator Kinerja Utama/Outcome (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Keluaran/Output dengan target/sasaran yang memperhatikan perhitungan/proyeksi capaian target pada RPJMN 2020-2024 serta mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian program/kegiatan pada RPJMN dan Renstra periode sebelumnya. Selain itu, rumusan Program dan Kegiatan yang dirancang dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini juga memperhatikan berbagai dinamika lingkungan dan isu strategis yang berkembang, serta memperhatikan perencanaan berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, sehingga pengelolaan Program Bangga Kencana dapat tepat sasaran dan memberi manfaat lebih kepada masyarakat Indonesia.

#### B. Isu Strategis

Berbagai isu strategis yang berkembang di Indonesia saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/kegiatan pada Renstra BKKBN 2020-2024 diantaranya adalah:

- Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - Bonus demografi; Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/total fertility rate (TFR). Selama lima tahun terakhir, TFR mengalami penurunan dari 2,41 anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15-49 tahun (SP 2010), menjadi 2,40 (SDKI 2017), dan data terakhir menunjukkan pada angka menjadi 2,38 (Survei RPJMN/SKAP 2018). Dalam jangka waktu yang

relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk Indonesia saat ini ditandai meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (demographic dividend) dengan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi, yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan tetap menjaga TFR pada level tertentu, dan bonus demografi juga merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan lintas sektor pembangunan.

- Aging population; Perubahan struktur umur penduduk Indonesia yang secara perlahan semakin "menua" merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Jumlah dan proporsi lansia di Indonesia akan mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingan dengan negara-negara yang telah mengalami aging sebelumnya. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua (aging population) ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat.
- c. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga; Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Narasi ini, bahkan akan lebih komprehensif apabila dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang

juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang bekualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan).

Satu data kependudukan; Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat kebenarannya. dipertanggungjawabkan Disatu sisi. Pendataan Keluarga (PK) yang menjadi tugas dan kewenangan BKKBN, harus dapat diintegrasikan dengan data sektor lain, seperti Sensus Penduduk (SP), serta Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga dapat terwujud satu data yang lengkap baik guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, maupun untuk mendukung operasionalisasi program/kegiatan Bangga Kencana di lini lapangan.

#### 2) Isu Strategis terkait pemenuhan layanan dasar;

a. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi; Kondisi kesehatan ibu dan anak juga belum menunjukkan hal yang menggembirakan, dimana Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017). Situasi ini harus mendapat perhatian khusus serta membutuhkan kerja keras bersama (lintas sektor dan pelibatan pihak swasta dan masyarakat) untuk terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia sebagaimana target yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). BKKBN berkontribusi dalam Kegiatan Prioritas Nasional

- (KP) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi tentu perlu merumuskan program/kegiatan yang spesifik dalam penanganan AKI dan AKB ini. Salah satu penyebab tingginya AKI adalah 4 (empat) terlalu, yakni terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat dan terlalu tua. Kehamilan yang tidak diinginkan di usia muda akan sangat berisiko pada kematian atau dapat berdampak buruk pada bayi yang dikandungnya. Risiko tersebut dapat diminimalkan dengan operasionalisasi Program Bangga Kencana yang tepat. Salah satunya dengan memastikan individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro), dan layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal.
- Penurunan penggunaan kontrasepsi modern; Penggunaan kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Ratem/mCPR) menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen (SDKI 2017). Penurunan tertinggi bahkan terjadi pada segmen usia 15 tahun hingga 29 tahun yang merosot hingga 4%. Diperkirakan 2 (dua) penyebab utama menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan tepercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern). Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, melalui peningkatan akses diantaranya lavanan jaminan ketersediaan kontrasepsi, termasuk alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB pelayanan KBbergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyasar muda/pasangan pasangan usia millenial, peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang

- dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini.
- Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan c. reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relative tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga.
- d. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Suburyang belum terlayani (unmetneed) di Indonesia dikategorikan masih tinggi. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, unmetneed terus mengalami penurunan walaupun terjadi fluktuasi di antara tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2015, posisi unmetneed sebesar 18,3 persen (Supas 2015), turun menjadi 15,8 persen pada tahun 2016, naik menjadi 17,50 persen pada tahun 2017 dan kembali turun menjadi 12,4 persen pada tahun 2018 (Survei RPJMN/SKAP 2016-2018). Dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya, diketahui bahwa unmetneed lebih tinggi di daerah

- perkotaan (11 persen) dibandingkan di daerah perdesaan (10 persen). Dua puluh tiga persen wanita tidak mau ber-KB karena alasan kekhawatiran terhadap efek samping, sedangkan pada kalangan pria, ada 32 persen pria yang dirinya ataupun isterinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB.
- Prevalensi stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Di Indonesia, angka Prevalensi stunting masih cenderung tinggi yaitu 37,2 persen pada tahun 2013. Walaupun angka tersebut sudah mengalami penurunan menjadi 30,8 persen pada tahun 2018, pemerintah tetap harus memberikan perhatian serius terhadap isu ini, terutama agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan.

a.

- Isu Strategis terkait membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
  - Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga: Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa belum menggembirakan, hal ini terlihat dari jumlah keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga baru mencapai 38 persen (SKAP 2018). Adapun 8 fungsi keluarga tersebutadalah: 1) Fungsi Agama; 2) Fungsi Sosial Budaya; 3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; 4) Fungsi Perlindungan; 5) Fungsi Reproduksi; 6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; 7) Fungsi Ekonomi, dan 8) Fungsi Pembinaan Lingkungan (Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga). Keluarga memiliki peranan yang penting dalam upaya pembentukan pengembangan karakter manusia Indonesia yang positif. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang berkarakter. Lebih lanjut, untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing dalam kompetisi dengan negara-negara lain maka peran kebudayaan dan karakter bangsa menjadi sangat penting. Cita-cita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berbudaya dan berkarakter dapat dilakukan melalui pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan dalam keluarga. Keluarga bertanggung jawabuntuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terkait nilai toleransi dan saling menghargai, gotong royong, sopan santun, kebersamaan dan kerukunan, kepedulian terhadap sesama, serta cinta tanah air (nasionalisme). Hal ini dapat didukung oleh kegiatan pembangunan keluarga yang mensosialisasikan serta membudayakan 8 fungsi keluarga

- sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral dan karakter yang bermartabat.
- Pernikahan usia anak: Kasus pernikahan usia anak banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dan telah menjadi perhatian internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia anak, kehamilan pada usia yang sangat muda, gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran, infeksi penyakit menular seksual, serta risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia yang relatif sangat muda. Meskipun angka pernikahan anak mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada tahun 1985, 26 persen pada tahun 2010, dan 23 persen pada tahun 2016, namun prevalensinya masih relative konstan. Dalam laporan "Perkawinan Usia Anak di Indonesia" yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) pada Januari 2017 terdapat 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi dibanding angka nasional (22,8 persen). Prevalensi atau angka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi di perdesaan dengan angka 27,1 persen, dibandingkan dengan di perkotaan (17,1 persen). Permasalahan lain, perkawinan anak di bawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi yang sesungguhnya, karena banyak perkawinan disamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun. Perkawinan anak juga akan berdampak besar pada generasi yang selanjutnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Keadaan ekonomi rendah akan mengakibatkan sulitnya akses terhadap fasilitas penunjang keterampilan dan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, pangan dan gizi serta akses terhadap lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Langkah penanggulangan isu ini diantaranya dapat melalui penanaman norma sosial dan budaya praktik penundaan usia menikah melalui keluarga (orangtua), kelompok

kegiatan, pendidikan/sosialisasi kesehatan reproduksi melalui sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat.

#### 1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi penguatan Program Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kedepan, BKKBN perlu menggali potensi-potensi yang dimiliki dan memahami segala permasalahan kependudukan di Indonesia saat ini. Analisis atas ketimpangan yang ada antara potensi dan permasalahan harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat (tepat sasaran) sekaligus mampu menjawab tantangan atas isu strategis yang berkembang. Potensi dan permasalahan yang ada saat ini diantaranya:

- Struktur penduduk Indonesia menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (demographic dividend). Dalam upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, diperlukan strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan, serta diperlukan langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif. Untuk memenuhi hal tersebut, dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu memperhatikan beberapa permasalahan pengendalian penduduk diantaranya;
  - a. Angka kelahiran total secara nasional masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang, serta perlunya perhatian terhadap tingginya disparitas TFR dan kondisi demografi antar wilayah.
  - b. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk.
  - c. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan.

2)

- d. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang menunjukkan belum optimalnya keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan bidang Kependudukan.
- e. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan terstruktur untuk KIE/promosi Program Bangga Kencana.
- Melalui Pembangunan Sosial Ekonomi dan Program Keluarga Berencana, Indonesia berhasil menekan angka kelahiran dari 5,6 anak per wanita tahun 1967-1971 menjadi 2,4 anak tahun 2016-2018. Hasilnya, laju pertumbuhan penduduk (LPP) dapat dihambat dari 2,3 persen antara tahun 1971-1980 menjadi 1,43 persen tahun 2010-2015. Diperkirakan LPP 2015-2020 menurun mejadi 1,1 persen, menjadi 0,81% pada periode 2025-2030, dan diharapkan dapat mencapai 0,41 persen tahun 2040-2045 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045; BPS, Bappenas, UNFPA 2018). Meski begitu, jumlah penduduk masih akan bertambah dari 269,6 juta tahun 2020, menjadi 294,1 juta pada tahun 2030 dan diperkirakan akan mencapai 318,9 juta tahun 2045. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras untuk menekan angka kelahiran (TFR) mencapai 2,1 per anak tahun 2024. Telah terbukti bahwa keberhasilan penurunan Fertilitas banyak dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan, penurunan kematian, serta peningkatan pendidikan dan urbanisasi. Sehingga untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan TFR 2,1 tahun 2024 diperlukan dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini merupakan permasalahan sekaligus potensi yang kedepannya harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat sasaran serta memperhatikan bahwa LPP tidak hanya terkait dengan tingkat kelahiran saja, tetapi juga terkait dengan kematian dan migrasi. LPP merupakan isu lintas sektor/bidang, penguatan peran lintas sektor/bidang dalam mencapai penurunan LPP harus ditangani Tim Lintas K/L yang dikoordinasi oleh Pemerintah, terutama dibawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
- 3) Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani berbagai instrumen hak asasi manusia serta memiliki komitmen

terhadap berbagai program pembangunan kesehatan dan keluarga berencana yang tertuang dalam Program Aksi ICPD, Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) termasuk di dalamnya kemitraan global Family Planning 2020 (FP2020). Salah satu tujuan FP2020 adalah untuk mendukung hak-hak setiap perempuan (kesetaraan hak perempuan) untuk dapat menentukan secara bebas, dan untuk diri mereka sendiri, apakah mereka ingin memiliki anak, kapan akan memilikinya, dan berapa jumlah anak yang ingin dimiliki. Begitupun dengan SDGs yang juga memiliki target untuk mencapai kesetaraan gender. Program KB, atau yang saat ini disebut dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) juga harus memperhatikan isu-isu kesetaraan dalam pengembangan kegiatan-kegiatan prioritasnya. Program Bangga Kencana di Indonesia (khususnya Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) saat ini telah mencapai tahapan yang matang dimana tingkat pemakaian kontrasepsi cukup tinggi (sekitar 61 persen untuk semua jenis kontrasepsi dan sekitar 57 persen untuk kontrasepsi modern). Dibutuhkan strategi yang inovatif untuk menjangkau sasaran yang semakin terfokus pada wilayah legok dan fokus pada penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penggarapan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) tahun 2020-2024 diantaranya;

- Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan unmetneed antar wilayah.
- b. Tingginya Peserta KB yang putus pakai (*Drop Out*) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria.
- c. Belum optimalnya sistem sinkronisasi faskes yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ke dalam SIM BKKBN.
- d. Masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan bidang KBKR di daerah.
- e. Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP).
- 4) Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini

sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikan dimanapun ia berada, baik dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun institusi pengasuhan alternatif. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian remaja terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Pendidikan anak usia dini harus dilakukan secara holistik (menyeluruh). Pengembangan dan pendidikan anak sejak usia dini merupakan investasi yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan karakter anak. Demikian pula dalam pembinaan remaja, keluarga merupakan wahana yang tepat dalam melakukan pendampingan terhadap remajanya untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian dalam kaitan dengan lanjut usia, sebagian besar lansia di Indonesia masih tinggal bersama keluarga. Oleh karena itu, keluarga harus dipersiapkan agar memahami konsep 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan mampu melakukan pendampingan perawatan jangka panjang (long-term care) lansia. Tujuh dimensi lansia tangguh tersebut adalah; 1) Spiritual; 2) Intelektual; 3) Fisik; 4) Emosional; 5) Sosial-Kemasyrakatan; 6) Profesional Vokasional; dan 7) Lingkungan. Sementara itu, lansia yang potensial tetap didorong untuk menjadi lansia yang aktif (active aging) yang dapat bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama dalam pembangunan keluarga diantaranya:

- a. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
- b. Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (Generasi milenial dan generasi Z).
- c. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga.
- d. Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga.
- e. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia.

- f. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga.
- g. Masih terjadi disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga lintas sektor.
- 5) Intervensi komunikasi yang dikenal sebagai "komunikasi perubahan perilaku" atau "behavior change communication" (BCC) digunakan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat guna memberikan dampak terhadap tujuan program vang diimplementasikan. Komunikasi berlangsung dalam 3 (tiga) domain utama; 1) lingkup sosio politik (lingkungan dan kebijakan yang mendukung), 2) sistem penyediaan layanan (akses kepada layanan dan produk), dan 3) interaksi antar individu anggota masyarakat (faktor yang secara langsung berkaitan dengan perilaku individu). Keberhasilan advokasi dan penggerakan akan memberikan efek ganda; pada tingkat provinsi/kabupaten/kota dapat memunculkan berbagai dukungan dari sisi regulasi, dan pada tingkat masyarakat dan individu dengan memperhatikan Audience insight (keinginan inti penerima pesan) akan memunculkan penguatan jejaring dan penguatan norma yang semakin mendorong sikap kolektif yang berpihak terhadap program Bangga Kencana. Perbaikan pada strategi advokasi perlu menekankan pada bukti dalam melakukan advokasi (evidence based advocacy) dan tahapan-tahapan advokasi yang disusun harus berdasarkan pada teori dan hasil lapangan yang telah diuji. Lebih lanjut terkait data dan informasi, BKKBN bertanggung jawab melakukan Pendataan Keluarga (PK) untuk memenuhi kebutuhan data basis keluarga secara nasional. Hasil PK ini dijadikan dasar dalam penentuan sasaran kegiatan operasional sehingga dapat lebih tepat dan efektif/efisien karena didasarkan pada kondisi, potensi, dan kebutuhan aktual dari masing-masing keluarga. Pendataan keluarga juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesertaan ber-KB (penggunaan metode kontrasepsi yang tepat, efektif, aman, dan nyaman).

Dari berbagai potensi yang ada masih terjadi kesenjangan antara harapan dan hasil di lapangan, sehingga perlu diidentifikasi beberapa permasalahan terkait advokasi, penggerakan dan informasi yang perlu mendapatkan penguatan, diantaranya:

- a. Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program Bangga Kencana.
- Kurang optimalnya sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Advokasi, KIE, dan penggerakan lini lapangan.
- c. Kondisi kelembagaan di Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya menunjang tugas dan fungsi advokasi dan KIE Program Bangga Kencana.
- d. Belum optimalnya fokus dan kesinambungan penggerakan Mekanisme Operasional (Mekop) Lini Lapangan.
- e. Belum terbangunnya mekanisme penjaringan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat secara efektif dalam advokasi, KIE dan Penggerakan program Bangga Kencana.
- f. Perlunya peningkatan kualitas data basis program Bangga Kencana (termasuk dukungan dari sisi Teknologi Informasi/TI).
- Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi 6) SDM adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan telah berjalan dengan baik untuk mempersiapkan ASN BKKBN agar mampu mengemban tugas fungsi yang diberikan secara berkualitas serta para tenaga program yang mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun berjenjang terus dilakukan dengan mengupayakan penyediaan tenaga pelatih/pengajar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sejalan dengan itu, terus dilakukan peningkatan kualitas kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan situasi, kondisi dan tuntutan program. Untuk meningkatkan mutu kediklatan terus dilakukan akreditasi Diklat serta meningkatkan jejaring kemitraan Diklat. Melalui "center of excellent", BKKBN terus menyiapkan program unggulan yang dapat dikerjasamakan (dalam dan luar negri), menyusun program kerjasama billateral dan multilateral yang aplikatif di lini lapangan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan internasional. Lebih lanjut, bidang penelitian dan pengembangan saat ini telah menghasilkan berbagai hasil penelitian yang mempunyai kualitas baik. Namun perlu terus dilakukan peningkatan kapabilitas tenaga fungsional peneliti serta perluasan kemitraan dengan perguruan

tinggi sehingga dapat menambah hasil penelitian yang lebih berkualitas dan dapat diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi. Beberapa permasalahan yang perlu dicermati lebih lanjut diantaranya;

- a. Kompetensi ASN BKKBN dalam aspek manajerial belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis dan persebaran tenaga fungsional Program Bangga Kencana yang belum merata.
- b. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Program Bangga Kencana baik oleh internal BKKBN maupun oleh mitra kerja dan pemangku kepentingan (stakeholders).
- c. Perlunya penguatan kerjasama bilateral dan multilateral, baik dalam maupun luar negeri yang benar-benar dapat dioperasionalkan dalam mendukung pengelolaan Program Bangga Kencana di Indonesia.

# BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1 Visi, Misi dan Janji Presiden RI

Presiden dan Wakil Presiden RI telah menyampaikan Visi dan Misi Pemerintah Periode tahun 2020-2024 dalam rangka "meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia maju" yang menjadi acuan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan harus dijadikan acuan oleh seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L periode tahun 2020-2024.

#### A. Visi

Visi Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden adalah "Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", yang mengandung harapan kinerja Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

#### B. Misi

Kemudian dalam upaya meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Bapak Presiden telah menetapkan 9 (sembilan) Misi, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.

9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Sembilan misi ini merupakan pengembangan, percepatan dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia).

#### C. Janji Presiden RI yang terkait Program Bangga Kencana

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pemetaan atas kesesuaian Program dan Kegiatan Prioritas (termasuk Sasaran Strategis, *Outcome*, dan *Output*) seluruh K/L terhadap Janji Presiden yang harus diimplementasikan selama periode 5 (lima) tahun kedepan, serta memberikan arahan agar berbagai Program/Kegiatan Prioritas yang disusun oleh K/L sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024.

Terkait dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), secara umum BKKBN berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian Janji Presiden dalam hal:

#### 1) Pembangunan Keluarga

BKKBN tetap dalam lingkup Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, mendukung sepenuhnya upaya pencapaian Janji Presiden terkait "Meningkatkan keterlibatan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga" dan "Revolusi Mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga". Terutama dalam pengembangan kegiatan prioritas dalam penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini, serta pengembangan kegiatan terkait Revolusi Mental dalam sistem sosial untuk penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat.

#### 2) Kependudukan

Pembangunan Kependudukan terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk "Memantapkan Reformasi Sistem Kependudukan Nasional". Dalam hal ini BKKBN mendukung sepenuhnya Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024 dalam Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial, terutama dalam upaya "Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan".

#### 3) Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk "Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). BKKBN mendukung Arah Kebijakan dan Strategi pada Rancangan RPJMN 2020-2024 dalam upaya "Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi".

#### 2.2 Penyelarasan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN

Dalam mendukung Visi, Misi dan Janji Presiden RI 2020-2024 sebagaimana tertera diatas, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

#### A. Penyelarasan Visi

"Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Visi tersebut mengandung pengertian:

- Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2.26 pada tahun 2020 sampai dengan 2.1 pada tahun 2024.
- 2) Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk

- berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
- 3) Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KBKR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.
- 4) Pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

#### B. Penyelasaran Misi

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

- Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
- 2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
- 3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup.
- 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
- 5) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
- 6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

#### C. Tujuan

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

- Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

#### 2.3 Sasaran Strategis

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada tahun 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per 1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan BKKBN. Agar upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka BKKBN menggunakan Indikator Dampak "Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)". Sebagaimana dijabarkan pada Bab I (Potensi dan Permasalahan), LPP merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Target LPP

dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini mengacu pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 dengan interval 5 (lima) tahunan, yang disusun pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan UNFPA. Ditetapkan target LPP dalam periode 2015-2020 dapat mencapai 1,11 persen, dan diharapkan penurunan LPP dapat mencapai 0,95 persen selama periode 2020-2025.

#### BAB III

# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Agenda pembangunan nasional selama 20 tahun telah dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Saat ini Indonesia memasuki periode terakhir RPJMN IV tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagais trategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dan 5) Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Visi Misi dan 5 (lima) arahan utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalam hal ini, BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung pada PN "Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing", dan PN "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan", dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing;

- Program Prioritas (PP) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; 1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan 2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP;
   Kesejahteraan Sosial.
- 3) PP Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP; 1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap KP Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, dengan fokus strategi untuk:

- a). Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi.
- b). Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah.
- c). Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender.
- d). Peningkatan kompetensi PKB/PLKB.
- e). Penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi.
- f). Penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.
- b. Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
  - PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari KP tersebut, BKKBN berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:

- Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.
- 2) Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.
- Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
- 4) Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

#### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
  - 1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga;
  - Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga;
  - Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
  - 4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga;
  - 5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan;
  - Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia;
  - 7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
  - Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);

- Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk;
- 3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan;
- 4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
  - Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR;
  - 2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR;
  - 3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus;
  - 4) Peningkatan KB Pria;
  - 5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP);
  - 6) Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- d. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
  - Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah;
  - Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- e. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
  - Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah;
  - 2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Berbagai arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tersebut diatas tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

- Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta Penguatan Kerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
  - a. Peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi.
  - b. Peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai input/masukan atas rumusan kebijakan.
  - c. Peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat kelembagaan.
- 2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Utama memiliki arah kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
  - a. Penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tata laksana.
  - b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN.
  - c. PenguatanPerencanaan Program danAnggaran.
  - d. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur.
  - e. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan yang berkualitas.
- 3. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, Inspektorat Utama memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui strategi:
  - a. Mendorong pengelolaan keuangan BKKBN secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, danefektif.

- b. Mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi.
- c. Mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala BKKBN dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi.
- d. Mendorong pencapaian sasaran strategis BKKBN secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tertera diatas, terutama dalam implemetasinya, BKKBN akan terus memperhatikan perkembangan situasi/kondisi dan isu strategis nasional serta prioritas strategi pembangunan nasional. Salah satu strategi pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baik oleh Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. BKKBN berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan) mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana serta memperhatikan konsep Pegarusutamaan Gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Program/Kegiatan Bangga Kencana yang inklusif gender.

#### 3.3 Kerangka Regulasi

Untuk mengimplementasikan Program Bangga Kencana secara maksimal diseluruh tingkatan wilayah, diperlukan dukungan kerangka regulasi selain dari apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Upaya implementasi Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah juga telah didukung dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah memasukan kegiatan-kegiatan prioritas lapangan Program Bangga Kencana di tingkat Provinsi

dan Kabupaten/Kota. Akan tetapi, integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan tetap harus disusun guna mensinergikan kerangka pendanaan dan kerangka pelayanan umum dan investasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024, yang menyatakan bahwa Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Oleh sebab itu, kerangka regulasi BKKBN diarahkan untuk menjamin terwujudnya pencapaian target/sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra BKKBN 2020-2024. Secara umum, diperlukan dukungan regulasi yang dapat memperkuat posisi dan pelaksanaan Program Bangga Kencana, diantaranya:

- a. Harmonisasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan Kelembagaan Program Bangga Kencana di daerah Provinsi dan Kab/Kota serta penguatan Program Bangga Kencana di Desa, sebagai dukungan untuk:
  - Kelembagaan Program Bangga Kencana di Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
  - Penyelenggaraan Program Bangga Kencana di Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota, maupun Desa.
  - 3) Penguatan implementasi Program Bangga Kencana oleh tenaga lini lapangan.

Hasil harmonisasi ini juga dapat menjadi acuan dalam merumuskan regulasi lain (baik baru, revisi, maupun regulasi turunan) dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah.

b. Peraturan Bersama atau MoU antara Kepala BKKBN, Kementerian
 Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penguatan Program Bangga Kencana di Desa, sebagai dukungan untuk:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait sistem pemerintahan desa mengambarkan yang posisi yang equal/setara antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dan pengelola desa sebagai organ pemerintah dan organ kemasyarakatan. Dalam hal ini, model kelembagaan untuk mendukung Program Bangga Kencana harus menyesuaikan dengan desain pemerintahan desa. Kelembagaan yang masuk dalam lingkup local self government agar keseluruhan program akan mendapatkan dukungan politis dan operasional dari pemerintah desa.
- Tenaga lini lapangan yang memiliki kualifikasi sebagai 2) perencana, pelaksana dan sekaligus penggerak. Tenaga lini lapangan harus dapat bekerja selaku birokrasi Program Bangga Kencana dan sebagai role model yang mampu menggerakkan potensi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara optimal. Kemampuan komunikasi dan negosiasi dengan kepala Desa, perangkat Desa dan tokoh masyarakat akan menjadi titik kekuatan keberhasilan program. Oleh karena itu, tenaga lini lapangan harus diberikan dukungan terkait dengan posisi kelembagaan program dalam perangkat desa kelembagaan pemerintahan desa sehingga kinerja para tenaga lini lapangan dapat dijalankan secara profesional, terencana, terukur serta memiliki dampak terhadap kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
- 3) Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Bangga Kencana lintas sektor yang dilaksanakan di Kampung KB. Sinkronisasi kegiatan lintas sektor dapat meningkatkan manfaat Kampung KB bagi masyarakat, terlebih apabila dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran (segmentasi sasaran wilayah) atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat (segmentasi kebutuhan masyarakat). Selain itu, koordinasi juga dapat dilakukan untuk mewujudkan sinergitas data yang dimiliki oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), terutama data terkait daerah

3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Indonesia) sebagai basis data penetapan segmentasi sasaran wilayah/lokasi Kampung KB yang perlu segera mendapat perhatian khusus.

- c. Kebijakan yang sistematis dan strategis dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan Program Bangga Kencana. Program Bangga Kencana harus dapat diselenggarakan secara terpadu dengan menggunakan pendekatan lintas sektoral dari seluruh potensi yang ada baik dari pemerintah, swasta, maupun peran serta/inisiatif masyarakat. Penguatan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Presiden RI sebagai dukungan regulasi terhadap Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan penyerasian kebijakan pembangunan Program Bangga Kencana terhadap beberapa permasalahan sangat diperlukan, antara lain:
  - 1) Penerbitan landasan hukum dan penyerasian kebijakan yang saat ini belum memadai, dimana masih terdapat beberapa peraturan pemerintah dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang belum disusun dan ditetapkan, dan masih banyak kebijakan pembangunan sektor lain yang belum sinergi dengan pembangunan Program Bangga Kencana.
  - 2) Penegasan komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan Program Bangga Kencana yang masih relatif rendah. Diperlukan regulasi untuk meningkatkan pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang Program Bangga Kencana, sinergitas kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan Program Bangga Kencana di dalam perencanaan daerah, dan peraturan perundangan yang mendukung penguatan kelembagaan.
  - 3) Penguatan koordinasi pembangunan Program Bangga Kencana dengan program pembangunan lainnya, antara lain koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Jampersal dan SJSN Kesehatan, serta penanganan atas kebijakan pembangunan Program Bangga Kencana yang selama ini masih bersifat parsial.
  - 4) Penerbitan Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang merupakan amanat/perintah dari

- Pasal 14 Peraturan Pemerintah 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
- d. Standarisasi pelayanan KB yang mempertimbangkan aspek penggerakan, pelayanan di fasilitas kesehatan yang merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Sistem Kesehatan Nasional dan aspek pembinaan kepesertaan ber-KB. Program Bangga Kencana merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional. Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada (termasuk target/indikator kinerja 2020-2024). Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan KB juga perlu dilakukan pembaruan dan pengayaan materi yang mempertimbangkan aspek penggerakan, pelayanan di fasilitas kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional dan aspek pembinaan kesertaan ber-KB.
- e. MoU antara BKKBN dengan Lembaga Administrasi Negara dalam rangka akreditasi lembaga/balai pendidikan dan pelatihan (Diklat) BKKBN. Tenaga Penyuluh KB/PLKB yang merupakan PNS/ASN memiliki fasilitas untuk meningkatkan kapasitasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dari ketentuan Pasal 11 tersebut menunjukkan bahwa adanya tuntutan bagi ASN untuk bekerja secara professional dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan penilaian akreditasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan BKKBN yang fungsinya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas standar kualitas pendidikan dan pelatihan, termasuk pelatihan kompetensi manajerial, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga Penyuluh KB/PLKB.
- f. Peraturan Bersama atau MoU antara Kepala BKKBN dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan profesionalitas tenaga lini lapangan KB di Desa. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dalam memperkuat basis program di tingkat lini lapangan sangat diperlukan mengingat sasaran terdepan dan wujud keberhasilan Program Bangga Kencana adalah pada tingkat lini lapangan yakni di perdesaan. Strategi untuk meningkatkan partisipasi kelembagaan di desa juga harus menyesuaikan kebijakan nasional di desa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- g. Peraturan Kepala BKKBN Tentang Sertifikasi tenaga Penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang memperhatikan penjenjangan/pengembangan kompetensi sesuai tuntutan program dan memperhatikan pemerataan distribusi tenaga PKB/PLKB di desa.
- h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Bangga Kencana BKKBN yang intinya sebagai acuan dan pedoman kerja bagi OPD Bidang Dalduk dan KB yang menangani bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota namun belum mengatur secara teknis tentang bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan. Untuk itu perlu disusun regulasi dalam bentuk Peraturan Kepala BKKBN tentang Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan agar program-program Bangga Kencana dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rancangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Menteri Dalam Negeri sebagai kementerian yang membawahi organisasi pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Peraturan teknis tersebut dibentuk atas perintah Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (8), Pasal 28 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam menyusun regulasi tentang Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan diperlukan harmonisasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah agar tidak ada kontradiksi antar peraturan.

#### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden, BKKBN harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis (tata laksana), dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BKKBN secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat kantor perwakilan di wilayah. Dalam perspektif ini kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dari sisi regulasi yang berlaku, penataan kelembagaan BKKBN berangkat dari Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputuan Presiden No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Memperhatikan bahwa permasalahan dan tantangan yang dihadapi BKKBN dewasa ini dan dimasa mendatang semakin kompleks dan dinamis, pengembangan dan penataan kelembagaan BKKBN perlu berorientasi pada sekurang-kurangnya lima prioritas sebagai berikut:

- a. Memperkuat budaya organisasi yang mengacu pada nilai-nilai good corporate governance (tata kelola organisasi yang baik) dan berorientasi pada outcome;
- Merevisi model operasional dengan prioritas penataan pada penyempurnaan dan percepatan proses bisnis dengan mengoptimalisasikan penggunaan teknologi informasi, digitalisasi dan big data;
- c. Menyempurnakan sistem birokrasi melalui penataan struktur organisasi yang lebih "adaptif" terhadap lingkungan bisnis (*adaptive*

- organization), dan dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien ("fit-for-purpose");
- d. Meningkatkan kontribusi dan prestasi kerja pegawai melalui pengembangan manajemen talenta yang sekurang-kurang mencakup peningkatan kinerja, kompetensi dan komitmen pegawai;
- e. Menjadi lebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan stakeholders untuk menghasilkan berbagai terobosan dalam pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, baik di tingkat nasional mapun daerah.

Pengembangan dan penataan Kelembagaan BKKBN memerlukan proses yang cukup panjang, selain harus mempertimbangkan arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran strategis serta sasaran program dan Indikator Kinerja Utama per-unit Eselon I yang akan dicapai dalam RPJMN dan Renstra BKKBN periode 2020-2024, juga harus memperhatikan sinergitas lintas sektor/lintas Kementerian/Lembaga (KL) serta memperhatikan arahan Presiden RI terkait penyederhanaan struktur organisasi K/L, pemangkasan alur birokrasi (pemangkasan Tk. Eselon III dan Eselon IV), serta penambahan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara untuk mempercepat pelaksanaan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian/keterampilannya.

# BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan RPJMN 2020-2024, Sasaran Strategis dan berbagai strategi operasional sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka di dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini perlu dirumuskan target kinerja dan kerangka pendanaan untuk periode 2020-2024. Secara garis besar terdapat 2 (dua) Program di lingkungan BKKBN, yaitu 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik (pendukung):

- Program Teknis: Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), terdiri dari:
  - a. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK);
  - b. Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK);
  - c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR);
  - d. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN); dan
  - e. Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (LALITBANG).
- 2. Program Generik: Program Dukungan Manajemen BKKBN, terdiri atas:
  - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama (SETTAMA); dan
  - b. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama (ITTAMA),

#### 4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir periode RPJMN/Renstra 2020-2024. Target kinerja terdiri dari sasaran Program yang merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program, dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BKKBN (sebagaimana tertera pada Bab II) yang mencerminkan berfungsinya keluaran, termasuk didalamnya Indikator Program/Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja Eselon I beserta kegiatan yang akan dilakukan (termasuk Indikator Kinerja Kegiatan/IKK) yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan untuk mencapai target/sasaran program dan IKU (outcome) yang telah ditetapkan.

a. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
 Berencana (Bangga Kencana), memiliki sasaran program
 "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana

dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, serta mewujudkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan", dengan Indikator Sasaran Program:

- Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun;
- Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR);
- 3) Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (*UnmetNeed*);
- 4) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19);
- 5) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga);
- 6) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP);
- 7) Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten;
- 8) Persentase Kerjasama Internasional Bangga Kencana yang diimplementasikan; dan
- 9) Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangga Kencana.

Program Bangga Kencana diimplementasikan oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon I (Kedeputian), yaitu:

- Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), dengan sasaran "Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan Bahagia (keluarga berkualitas)" yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - a) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga);
  - b) Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan usia 25-49 tahun; dan
  - c) Persentase Baduta Stunting.
- 2) Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK), dengan sasaran "Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk" yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) per WUS 15-49 tahun;
  - b) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK).
  - c) Indeks kepedulian terhadap Isu Kependudukan; dan
  - d) Persentase Kampung KB mandiri.

- 3) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), dengan sasaran "Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi" yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - a) Persentase angka prevalensi kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevelance Rate*/ mCPR);
  - b) Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (*UnmetNeed*);
  - c) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan
  - d) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun.
- 4) Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN), dengan sasaran "Meningkatnya cakupan dan kualitas advokasi KIE, jejaring kemitraan, kinerja petugas lini lapangan dan pengelolaan smart data dan informasi melalui teknologi" yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - a) Presentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana;
  - b) Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (*Drop Out*/DO); dan
  - c) Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (UnmetNeed).
- 5) Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (LALITBANG), memiliki sasaran program "Mewujudkan SDM Aparatur dan Tenaga Program Bangga Kencana, Penelitian dan Pengembangan, serta Kerjasama Internasional yang berkualitas" yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:
  - a) Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten;
  - b) Persentase Kerjasama Internasional Bangga Kencana yang diimplementasikan; dan
  - c) Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangga Kencana.

- b. Program Dukungan Manajemen BKKBN memiliki sasaran program "Meningkatnya kualitas pengelolaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di lingkungan BKKBN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik", dengan Indikator Sasaran Program:
  - Tingkat Kepuasan (Indeks) Layanan Dukungan Manajemen Program Bangga Kencana.
  - Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
  - 3) Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Program Dukungan Manajemen BKKBN dilaksanakan oleh 2 (dua) Unit Kerja Eselon I, yaitu:

- Sekretariat Utama (SETTAMA) yang melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, memiliki sasaran program "Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana" yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - a) Indeks Reformasi Birokrasi;
  - b) Opini atas laporan keuangan dari BPK;
  - c) Tingkat maturitas SPIP;
  - d) Indeks Sistem Merit;
- 2) Inspektorat Utama (ITTAMA) yang melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN memiliki sasaran program "Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Program Bangga Kencana", yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - a) Sertifikasi ISO 37001;
  - b) Persentase materialitas temuan eksternal terhadap anggaran BKKBN; dan
  - c) Level Kapabilitas APIP (IACM).

Penjabaran/turunan dalam mewujudkan sasaran program, sasaran Unit Eselon I beserta IKU yang telah ditetapkan, telah disusun target kinerja pada level kegiatan (Unit Kerja Eselon II) beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang disampaikan sebagaimana Lampiran I (Matrik Kinerja dan Pendanaan BKKBN).

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pendekatan penganggaran diarahkan agar berbasis program (money follows program) melalui penganggaran berbasis kinerja. Kerangka pendanaan disusun guna pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Rasionalisasi Kerangka Pendanaan BKKBN 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penganggaran perlu berorientasi pada hasil dengan menetapkan prioritas nasional dan pengembangan aspek kewilayahan. Penentuan prioritas nasional sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah dan hasil evaluasi capaian indicator Renstra BKKBN serta mempertimbangkan daya ungkit terhadap capaian nasional dan sasaran strategis.
- b. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang menjadi bahan pertimbangan besaran pagu anggaran dalam waktu tiga tahun kedepan perlu diperkuat. Reviu *baseline* yang menjadi dasar pengukuran efektifitas dan efisiensi anggaran BKKBN perlu memberikan *input* terhadap KPJM yang disusun. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja *(value for money)* dan penajaman anggaran berbasis kinerja berdasarkan kinerja tahun berjalan dan bukan terhadap realisasi.
- Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan skema alternative kerangka pendanaan untuk meningkatkan kualitas layanan public dan mengurangi ketimpangan pelayanan public antar daerah. Skema alternative pendanaan Program Bangga Kencana yang diperuntukan bagi daerah dapat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK non fisik dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), DAK Penugasan, dan/atau DAK Afirmasi. Penyaluran skema alternatif pendanaan tetap melalui proses sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi, baik sinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD, Renstra dan Renstrada, maupun sinkronisasi dalam penjabaran kegiatan pada RKP dan RKPD. memperhatikan isu strategis program/kegiatan Bangga Kencana dan

- sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- d. Skema hibah dalam dan luar negeri melalui mitra pembangunan juga dapat berkontribusi dan diberikan ruang untuk pengembangan Program Bangga Kencana yang bersifat inovatif. Kerangka pendanaan melalui mitra non-Pemerintah (swasta) dan pemberdayaan masyarakat atau public private partnership (PPP) juga memiliki potensi besar dalam kerangka pendanaan.
- 4.3 Perencanaan Program dan Kegiatan Prioritas berbasis Kewilayahan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 memprioritaskan indicator Sasaran Strategis yang harus dicapai secara nasional, akan tetapi capaian tingkat nasional juga tidak terlepas dari pencapaian target/sasaran di seluruh tingkatan wilayah. Untuk menjamin penggarapan Program dan Kegiatan Prioritas yang disusun dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat diimplementasikan secara baik di seluruh tingkatan wilayah diperlukan pemetaan target Sasaran Strategis per-Provinsi serta pemetaan potensi yang dapat menjadi focus penggarapan di setiap wilayah (Provinsi). Pemetaan fokus penggarapan wilayah dalam Renstra BKKBN ini bersifat acuan dasar pengembangan kebijakan dan strategi Renstra per-Unit Kerja Eselon I (UKE I) dan Unit Kerja Eselon II (UKE II) 2020-2024, baik BKKBN Pusat maupun Perwakilan BKKBN Provinsi. Selain itu, pemetaan wilayah ini dapat dikembangkan secara lebih spesifik sampai tingkat intervensi yang paling bawah. Pemetaan fokus penggarapan Program Bangga Kencana dalam Renstra BKKBN 2020-2024 secara garis besar dikelompokan sebagai berikut:
  - a. Pemetaan Target Indikator Sasaran Strategis per-Provinsi;
    Penetapan target Sasaran Strategis per-Provinsi di dalam dokumen
    Renstra ini berdasarkan sumber data baseline SDKI 2017 dan
    Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2015-2045 serta sumber data
    lainnya yang terpercaya. Adapun hasil penetapan target Sasaran
    Strategis per- Provinsi dapat dilihat pada Tabel-Tabel di bawah ini;
    - Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun

NO	TOTAL PROPERTY.	TFR							
NO	PROVINSI	2017 1	2020	2021	2022	2023	2024		
1	DKI JAKARTA	2,24	1,96	1,94	1,92	1,91	1,89		
2	JAWA BARAT	2,36	2,15	2,12	2,10	2,07	2,04		

	NASIONAL	2,40	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1
34	KALIMANTAN UTARA	2,80	2,23	2,20	2,17	2,15	2,12
33	SULAWESI BARAT	2,74	2,33	2,31	2,28	2,26	2,23
32	PAPUA BARAT	3,19	2,35	2,33	2,30	2,28	2,26
31	KEPULAUAN RIAU	2,29	2,19	2,17	2,16	2,14	2,13
30	GORONTALO	2,46	2,21	2,18	2,15	2,12	2,08
29	BANGKA BELITUNG	2,30	2,25	2,22	2,19	2,16	2,1
28	BANTEN	2,34	2,19	2,17	2,14	2,12	2,0
27	MALUKU UTARA	2,86	2,27	2,24	2,21	2,19	2,1
26.	BENGKULU	2,30	2,24	2,21	2,17	2,14	2,10
25	PAPUA	3,31	2,29	2,27	2,24	2,22	2,2
24	NUSA TENGGARA TIMUR	3,37	2,43	2,41	2,39	2,36	2,3
23	NUSA TENGGARA BARAT	2,54	2,25	2,23	2,21	2,19	2,1
22	BALI	2,07	1,97	1,96	1,94	1,92	1,9
21	MALUKU	3,29	2,93	2,91	2,89	2,87	2,8
20	SULAWESI TENGGARA	2,83	2,30	2,28	2,26	2,24	2,2
19:	SULAWESI SELATAN	2,44	2,13	2,11	2,10	2,08	2,0
18	SULAWESI TENGAH	2,71	2,27	2,24	2,20	2,17	2,1
17	SULAWESI UTARA	2,24	2,10	2,07	2,05	2,02	1,9
16	KALIMANTAN TIMUR	2,68	2,17	2,14	2,11	2,08	2,0
15	KALIMANTAN SELATAN	2,41	2,26	2,23	2,19	2,16	2,1
14	KALIMANTAN TENGAH	2,47	2,19	2,15	2,10	2,06	2,0
13	KALIMANTAN BARAT	2,65	2,24	2,21	2,18	2,14	2,1
12	LAMPUNG	2,30	2,24	2,21	2,17	2,14	2,1
11	SUMATERA SELATAN	2,63	2,33	2,30	2,27	2,23	2,1
10	JAMBI	2,31	2,23	2,20	2,17	2,14	2,1
9	RIAU	2,87	2,25	2,23	2,20	2,18	2,1
8	SUMATERA BARAT	2,48	2,24	2,22	2,20	2,18	2,1
7	SUMATERA UTARA	2,93	2,20	2,18	2,16	2,14	2,1
6	ACEH	2,72	2,19	2,17	2,15	2,13	2,1
5	JAWA TIMUR	2,08	1,92	1,91	1,89	1,86	1,8
3	JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA	2,32	2,05	1,90	2,00	1,97	1,9

Keterangan: )\* Baseline SDKI 2017

# Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR)

NICE	PROVINSI	mCPR							
NO.	PROVINSI	2017]*	2020	2021	2022	2023	2024		
1	DKI JAKARTA	50,60	56,56	56,91	57,27	57,62	58,07		
2	JAWA BARAT	59,50	62,87	63,27	63,67	64,07	64,59		
3	JAWA TENGAH	59,50	63,93	64,35	64,76	65,17	65,70		
4	DI YOGYAKARTA	57,30	62,01	62,40	62,79	63,17	63,67		
5	JAWA TIMUR	63,10	65,24	65,66	66,08	66,50	67,04		
6	ACEH	46,40	56,13	56,48	56,83	57,18	57,63		
7	SUMATERA UTARA	43,90	56,57	56,92	57,27	57,62	58,08		
8	SUMATERA BARAT	50,10	54,44	54,78	55,12	55,46	55,89		
9	RIAU	50,70	60,46	60,83	61,21	61,58	62,07		
10	JAMBI	63,50	64,64	65,04	65,44	65,84	66,36		
11	SUMATERA SELATAN	61,40	65,29	65,69	66,10	66,51	67,03		
12.	LAMPUNG	65,70	66,47	66,88	67,29	67,71	68,24		
13	KALIMANTAN BARAT	61,00	66,55	66,97	67,38	67,80	68,33		
14	KALIMANTAN TENGAH	69,40	72,33	72,78	73,23	73,68	74,26		
15	KALIMANTAN SELATAN	64,40	66,32	66,74	67,15	67,56	68,09		
16	KALIMANTAN TIMUR	59,30	66,21	66,62	67,04	67,45	67,98		

	NASIONAL	57,12	61,78	62,16	62,54	62,92	63,41
34	KALIMANTAN UTARA	46,90	56,62	56,97	57,32	57,68	58,13
33	SULAWESI BARAT	48,60	55,64	55,98	56,33	56,68	57,12
32	PAPUA BARAT	35,90	51,45	51,77	52,09	52,41	52,83
31	KEPULAUAN RIAU	46,30	48,70	49,01	49,31	49,61	50,00
30	GORONTALO	59,60	63,25	63,64	64,04	64,43	64,94
29	BANGKA BELITUNG	62,20	62,77	63,16	63,55	63,94	64,45
28	BANTEN	57,30	59,80	60,17	60,54	60,91	61,39
27	MALUKU UTARA	50,00	59,30	59,67	60,04	60,41	60,88
26	BENGKULU	64,40	65,09	65,49	65,90	66,30	66,83
25	PAPUA	35,90	54,17	54,51	54,85	55,18	55,62
24	NUSA TENGGARA TIMUR	41,20	56,09	56,44	56,79	57,14	57,59
23	NUSA TENGGARA BARAT	50,90	55,80	56,15	56,49	56,84	57,29
22	BALI	54,80	56,82	57,18	57,53	57,88	58,34
21	MALUKU	39,20	45,42	45,70	45,99	46,27	46,63
20	SULAWESI TENGGARA	46,50	55,63	55,97	56,32	56,66	57,11
19	SULAWESI SELATAN	48,70	54,82	55,16	55,50	55,85	56,28
18	SULAWESI TENGAH	59,40	65,26	65,66	66,07	66,47	67,00
17	SULAWESI UTARA	61,00	63,23	63,63	64,02	64,41	64,92

Keterangan: J\* Baseline SDKI 2017

## 3) Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmetneed)

NO.	PROVINSI	UNMET NEED							
100	PROVINSI	2017	2020	2021	2022	2023	2024		
1	DKI JAKARTA	15,60	10,32	9,88	9,45	9,01	8,55		
2	JAWA BARAT	11,00	8,17	7,69	7,22	6,75	6,22		
3	JAWA TENGAH	10,80	6,82	6,34	5,86	5,38	4,84		
4	DI YOQYAKARTA	6,30	5,74	5,62	5,50	5,38	5,29		
5	JAWA TIMUR	7,70	7,54	7,36	7,18	7,00	6,84		
6	ACEH	12,30	10,49	10,32	10,15	9,97	9,85		
7	SUMATERA UTARA	10,70	8,64	8,50	8,36	8,21	8,11		
8	SUMATERA BARAT	9,10	8,76	8,63	8,49	8,35	8,27		
9	RIAU	11,30	9,15	8,97	8,79	8,61	8,47		
10	JAMBI	6,80	6,95	6,79	6,63	6,47	6,33		
11	SUMATERA SELATAN	8,60	7,88	7,70	7,51	7,32	7,16		
12	LAMPUNG	8,40	8,69	8,47	8,26	8,04	7,85		
13	KALIMANTAN BARAT	9,80	8,36	8,16	7,95	7,74	7,55		
14	KALIMANTAN TENGAH	6,30	5,73	5,55	5,36	5,18	5,00		
15	KALIMANTAN SELATAN	8,50	8,37	8,16	7,96	7,75	7,57		
16	KALIMANTAN TIMUR	10,20	8,33	8,13	7,92	7,72	7,54		
17	SULAWESI UTARA	12,40	10,88	10,40	9,92	9,44	8,92		
18	SULAWESI TENGAH	9,40	8,04	7,85	7,66	7,47	7,31		
19	SULAWESI SELATAN	14,40	8,86	8,45	8,03	7,62	7,17		
20	SULAWESI TENGGARA	15,20	13,18	12,97	12,76	12,54	12,39		
21	MALUKU	19,00	13,68	13,30	12,91	12,53	12,17		
22	BALI	10,70	9,29	8,86	8,43	8,00	7,53		
23	NUSA TENGGARA BARAT	15,60	14,72	14,48	14,24	14,00	13,84		
24	NUSA TENGGARA TIMUR	17,60	13,89	13,57	13,44	13,21	13,05		
25	PAPUA	15,20	12,03	11,85	11,67	11,48	11,36		
26	BENGKULU	6,90	7,17	7,01	6,84	6,67	6,52		
27	MALUKU UTARA	17,70	14,68	14,41	14,14	13,86	13,65		
28	BANTEN	9,80	9,67	9,49	9,31	9,12	8,98		
29	BANGKA BELITUNG	5,60	5,86	5,74	5,61	5,49	5,39		
30	GORONTALO	12,90	9,90	9,43	8,95	8,47	7,96		
31	KEPULAUAN RIAU	10,70	8,88	8,50	8,13	7,76	7,36		

	NASIONAL	10,50	8,60	8,30	8,00	7,70	7,40
34	KALIMANTAN UTARA	15,80	13,40	13,18	12,96	12,73	12,57
33	SULAWESI BARAT	14,60	13,17	12,96	12,75	12,53	12,39
32	PAPUA BARAT	23,60	20,00	19,73	19,45	19,17	19,01

Keterangan: )\* Baseline SDKI 2017

# Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

NO:	PROVINSI	ASFR 15-19 Tahun							
1957	EROVINSI	2020	2021	2022	2023	2020			
1	DKI JAKARTA	13	13	11	11	10			
2	JAWA BARAT	30	29	25	24	22			
3	JAWA TENGAH	26	25	22	21	19			
4	DI YOGYAKARTA	17	16	14	13	12			
5	JAWA TIMUR	31	30	26	25	22			
6	ACEH	9	9	8	7	7			
7	SUMATERA UTARA	22	21	18	17	16			
8	SUMATERA BARAT	15	14	13	12	- 11			
9	RIAU	33	31	27	26	23			
10	JAMBI	24	23	20	19	17			
11	SUMATERA SELATAN	27	26	22	21	19			
12	LAMPUNG	36	34	30	29	26			
13	KALIMANTAN BARAT	61	58	51	49	44			
14	KALIMANTAN TENGAH	30	29	25	24	22			
15	KALIMANTAN SELATAN	40	38	34	32	29			
16	KALIMANTAN TIMUR	16	15	13	13	- 11			
17	SULAWESI UTARA	43	41	36	34	31			
18	SULAWESI TENGAH	38	36	32	30	27			
19	SULAWESI SELATAN	40	38	34	32	29			
20	SULAWESI TENGGARA	45	43	38	36	32			
21	MALUKU	25	24	21	20	18			
22	BALI	21	20	18	17	15			
23	NUSA TENGGARA BARAT	38	36	32	30	27			
24	NUSA TENGGARA TIMUR	20	19	17	16	14			
25	PAPUA	53	51	45	43	38			
26	BENGKULU	38	36	32	30	27			
27	MALUKU UTARA	43	42	36	35	31			
28	BANTEN	13	12	1.1	10	9			
29	BANGKA BELITUNG	28	27	24	23	20			
30	GORONTALO	43	42	36	35	31			
31	KEPULAUAN RIAU	13	12	11	10	9			
32	PAPUA BARAT	50	48	42	40	36			
33	SULAWESI BARAT	44	42	37	35	32			
34	KALIMANTAN UTARA	13	13	11	11	10			
	NASIONAL	25	24	-21	20	18			

# Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun

NO	PROVINSI	MUKP							
1950	TROVINGE	2020	2021	2022	2023	2024			
-1	DKI JAKARTA	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0			

	NASIONAL	21,90	22,00	22,00	22,10	22,10
34	KALIMANTAN UTARA	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
33	SULAWESI BARAT	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
32	PAPUA BARAT	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
31	KEPULAUAN RIAU	22,9	23,0	23,0	23,2	23,2
30	GORONTALO	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
29	BANGKA BELITUNG	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
28	BANTEN	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
27	MALUKU UTARA	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
26	BENGKULU	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
25	PAPUA	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
24	NUSA TENGGARA TIMUR	22,9	23,0	23,0	23,2	23,2
23	NUSA TENGGARA BARAT	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
22	BALI	22,9	23,0	23,0	23,2	23,2
21	MALUKU	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
20	SULAWESI TENGGARA	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
19	SULAWESI SELATAN	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
18	SULAWESI TENGAH	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
17	SULAWESI UTARA	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
16	KALIMANTAN TIMUR	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
15	KALIMANTAN SELATAN	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
14	KALIMANTAN TENGAH	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
13	KALIMANTAN BARAT	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
12	LAMPUNG	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
11	SUMATERA SELATAN	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
10	JAMBI	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
9	RIAU	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
8	SUMATERA BARAT	22,9	23,0	23,0	23,2	23,2
7	SUMATERA UTARA	22,9	23,0	23,0	23,2	23,2
6	ACEH	21,9	22,0	22,0	22,1	22,
5	JAWA TIMUR	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
4	DI YOGYAKARTA	23,0	23,0	23,0	21,0	21,0
3	JAWA BARAT JAWA TENGAH	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0

### 6) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indikator ini dikembangkan untuk menangkap dinamika pembangunan keluarga secara komprehensif dan terintegrasi dalam upaya peningkatan kualitas keluarga Indonesia. Dalam indikator ini, kualitas keluarga dicirikan dengan dimensi ketenteraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Keluarga baik secara nasional maupun kewilayahan, mengidentifikasi isu strategis/permasalahan terkait kualitas keluarga, serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan yang dibutuhkan. Pencapaian indikator ini merupakan salah satu kunci dari keberhasilan Pembangunan Keluarga Indonesia yang berkontribusi dalam mewujudkan

Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi.

		Indeks Pembangunan Keluarga						
NO	PROVINSI	(iBangga)						
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	DKI JAKARTA	55.73	57.22	59,30	61.38	63.46		
2	JAWA BARAT	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55		
3	JAWA TENGAH	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20		
4	DI YOGYAKARTA	61.43	63.07	65.36	67.66	69.95		
5	JAWA TIMUR	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20		
6	ACEH	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20		
7	SUMATERA UTARA	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55		
8	SUMATERA BARAT	55,73	57.22	59.30	61.38	63,46		
9	RIAU	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46		
10	JAMBI	56.69	58.20	60.32	62,44	64.55		
11	SUMATERA SELATAN	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20		
12	LAMPUNG	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20		
13	KALIMANTAN BARAT	56.69	58.20	60.32	62.44	64.53		
14	KALIMANTAN TENGAH	56.69	58.20	60.32	62.44	64.5		
15	KALIMANTAN SELATAN	56.69	58.20	60.32	52.44	64.53		
16	KALIMANTAN TIMUR	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46		
17	SULAWESI UTARA	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46		
18	SULAWESI TENGAH	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20		
19	SULAWESI SELATAN	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55		
20	SULAWESI TENGGARA	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20		
21	MALUKU	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20		
22	BALI	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46		
23	NUSA TENGGARA BARAT	51.11	52,47	54.38	56.29	58.20		
24	NUSA TENGGARA TIMUR	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20		
25	PAPUA	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20		
26	BENGKULU	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20		
27	MALUKU UTARA	56.69	58.20	60.32	62.44	64.5		
28	BANTEN	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46		
29	BANGKA BELITUNG	56.69	58.20	60.32	62.44	64.5		
30	GORONTALO	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20		
31	KEPULAUAN RIAU	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46		
32	PAPUA BARAT	51.11	52.47	54.38	56.29	58,20		
33	SULAWESI BARAT	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20		
34	KALIMANTAN UTARA	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55		
- 1	NASIONAL	53 57	55	57	59	61		

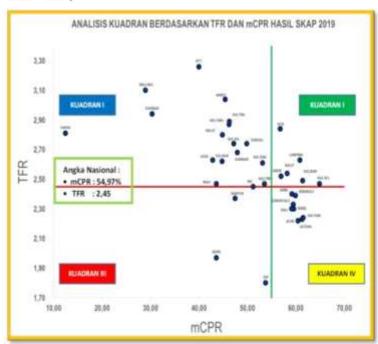
 Pemetaan prioritas penggarapan Program Bangga Kencana per-Provinsi;

Agar capaian target Program Bangga Kencana dapat tercapai di tengah keterbatasan yang ada, perlu perencanaan program yang memperhatikan fokus wilayah garapan. Analisis kuadran merupakan salah satu metode pemetaan wilayah yang ditentukan berdasarkan indicator Sasaran Strategis Renstra BKKBN 2020-2024 (Variabel analisis berdasarkan Sasaran Strategis Renstra) yang diprioritaskan pada 3 (tiga) Sasaran Strategis Renstra diantaranya TFR, mCPR dan Unmetneed.

#### mCPRdan TFR

Dengan kerangka piker bahwa CPR berhubungan negatif (berpengaruh terbalik) terhadap TFR, meningkatnya mCPR berpengaruh terhadap penurunan TFR. Pemetaan kuadran mCPR dan TFR sebagai berikut:

Grafik 1. Diagram Kuadran antara TFR dan mCPR (sumber data: SKAP 2019)



Pada kuadran I, terdapat 6 provinsi dengan kondisi mCPR dan TFR tinggi (anomali) yang dapat disebabkan antara lain karena tingginya angka putus pakai (DO), tingginya pengguna Alokon jangka pendek, atau banyaknya pengguna Alokon yang berusia pada akhir masa reproduksi (45-49 tahun) yang terlanjur telah memiliki banyak anak.

Kuadran II, terdapat 17 provinsi dengan kondisi mCPR rendah dan TFR tinggi, Provinsi pada posisi kuadran ini akan menjadi prioritas utama penggarapan Program Bangga Kencana terutama pada kegiatan-kegiatan untuk penurunan *UnmetNeed*, peningkatan MUKP dan penurunan ASFR kelompok usia 15-19 tahun, serta peningkatan penggunaan Alokon MKJP.

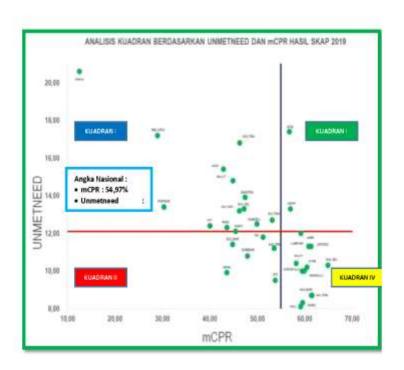
Kuadran III, terdapat 3 Provinsi dengan mCPR rendah dan TFR rendah (anomali) dan memerlukan perhatian khusus agar TFR dapat tetap terjaga rendah.

Sedangkan pada Kuadran IV, terdapat 8 provinsi dengan kondisi mCPR diatas rata-rata mCPR nasional dan TFR dibawah angka TFR nasional. Provinsi-provinsi ini perlu lebih memperhatikan keberlanjutan kesertaan ber-KB melalui pembinaan peserta KB Aktif (PA), Kelompok Kegiatan (Poktan) dan Program Pembangunan Keluarga (termasuk untuk mempertahankan PA), mengembangkan pemilihan penggunaan Alokon efektif terpilih untuk menjaga tidak terjadi kegagalan atau putus pakai (Drop Out) serta memperhatikan unmetneed yang kemungkinan disebabkan karena alasan jangkauan pelayanan atau alasan budaya/agama.

#### 2) mCPR dan Unmetneed

Dengan kerangka pikir bahwa *Unmetneed* berhubungan negatif (berpengaruh terbalik) terhadap mCPR, menurunnya *unmetneed* berpengaruh terhadap peningkatan mCPR, maka pemetaan kuadran yang dihasilkan sebagai berikut:





(sumber data: SKAP 2019)

Pada Kuadran I, terdapat 2 provinsi dengan mCPR telah melebihi rata-rata nasional tetapi *unmetneed* masih tinggi (anomali). Provinsi ini perlu fokus pada penyebab *unmetneed* yang masih tinggi yang disinyalir dapat disebabkan oleh minimnya akses/jangkauan pelayanan, ketakutan atas efek samping, dan/atau alasan lain.

Kuadran II, terdapat 14 provinsi dengan yang perlu menjadi prioritas penggarapan, dimana *unmetneed* tinggi dan mCPR masih rendah, fokus penggarapan kesertaan ber-KB pada provinsi ini perlu ditingkatkan.

Kuadran III, terdapat 6 provinsi dengan kondisi *unmetneed* cukup baik tetapi mCPR masih dibawah rata-rata nasional. Hal ini memerlukan perhatian lebih pada konseling dan sosialisasi kesehata reproduksi dan pengenalan metode kontrasepsi modern serta peningkatan kesertaan ber-KB MKJP.

Sedangkan pada Kuadran IV, terdapat 12 provinsi dengan kondisi terbaik dimana *unmetneed* berada di bawah rata-rata nasional dan mCPR telah melebihi rata-rata nasional. Provinsi-provinsi tersebut perlu melakukan strategi untuk mempertahankan capaian diantaranya dengan penguatan pembinaan PA melalui Poktan, Penguatan Pembangunan Keluarga, dan meningkatkan jangkauan/akses terhadap informasi, konseling kesehatan reproduksi dan pelayanan KB.

#### 3) Rasio Ketergantungan dan TFR

Dengan kerangka pikir bahwa Rasio Ketergantungan (RK) merepresentasikan ukuran bonus demografi, dimana TFR berpengaruh terhadap tahapan transisi demografi, menurunnya TFR berpengaruh terhadap pencapaian tahapan transisi bonus demografi, maka pemetaan kuadran yang dihasilkan sebagai berikut:

Grafik 3. Diagram Kuadran antara TFR dan RK (sumber data: SKAP 2019 dan SUPAS 2015)

Pada Kuadran I, terdapat 18 provinsi yang perlu menjadi prioritas penggarapan dengan RK telah melebihi rata-rata nasional, tetapi TFR masih tinggi dan perlu fokus pada penyebab TFR yang masih tinggi.

Kuadran II terdapat 5 provinsi dengan TFR masih tinggi dan RK sudah di bawah rata-rata nasional.

Kuadran III menunjukkan terdapat 10 provinsi dengan kondisi baik ditandai dengan TFR dan RK berada di bawah rata-rata nasional.

Sedangkan pada Kuadran IV, terdapat 1 provinsi dengan TFR berada di bawah rata-rata nasional dan RK melebihi rata-rata nasional.

Analisis kuadran sebagaimana contoh diatas dapat dikembangkan dengan berbagai variabel lain oleh masing-masing unit kerja, baik Unit Kerja Eselon I (UKE-I) maupun Unit Kerja Eselon II (UKE-II) Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi untuk dijadikan dasar pengembangan strategi penggarapan Program Bangga Kencana sesuai dengan kegiatan prioritas yang lebih spesifik dengan memperhatikan kondisi di masing-masing wilayah (Provinsi).

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis BKKBN (Renstra) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga Renstra BKKBN ini disusun dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah. Secara umum, kerangka logis yang dibangun dalam Renstra BKKBN ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan kontribusi secara langsung dan terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu acuan yang paling mendasar dalam penyusunan Renstra ini adalah "Prioritas Nasional (PN) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing", dengan Program Prioritas (PP) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan, melalui penyelenggaraan Kegiatan Prioritas (KP) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, serta KP Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi. Sedangkan yang terkait dengan "PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan", berada pada PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila yang fokus dalam KP Revolusi Mental dalam Sistem Sosial.

Renstra BKKBN 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam pengelolaan Program Bangga Kencana yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan kerangka waktu dalam pencapaian sasaran program/kegiatan prioritas, baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maupun di setiap tahunnya (program/kegiatan jangka pendek/tahunan). Pembangunan Program Bangga Kencana diharapkan mampu mengikuti perkembangan isu dan lingkungan strategis sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan untuk pencapaian tujuan BKKBN. Renstra ini disusun melalui rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian beserta evaluasinya. Dengan demikian, seluruh Unit Kerja di lingkungan BKKBN memiliki target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi, baik pada setiap tahunnya, pertengahan periode RPJMN/Renstra 2020-2024, maupun pada akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Renstra BKKBN 2020-2024 juga sudah memenuhi kaidah-kaidah *management* strategic planning yang dapat menggambarkan keefektifan organisasi dalam

menjalankan amanat Program Bangga Kencana. Oleh karena itu, pada saat penyusunan Renstra BKKBN diparalelkan dengan penyusunan Balanced Score Card (BSC) BKKBN, terutama untuk BSC pada level corporate (lembaga) dan Eselon I untuk mengelola dan mengukur perencanaan strategis dengan mensinergikan seluruh elemen organisasi yang ada dalam berbagai perspektif (perspektif Customer/Pelanggan, Perspektif Internal Business Process/Bisnis Internal, Perspektif Learning and Growth/Pertumbuhan dan Pembelajaran, serta Perspektif Finance/Keuangan). Secara umum BSC yang disusun dapat membantu BKKBN dalam memperjelas dan menerjemahkan upaya dukungan terhadap Visi, Misi dan Janji Presiden melalui berbagai strategi yang tertera dalam Renstra BKKBN 2020-2024, serta untuk mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis dalam merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis.

Selanjutnya, dalam operasionalisasi Renstra BKKBN 2020-2024, revitalisasi program/kegiatan dapat dilakukan melalui penajaman tugas/fungsi BKKBN dengan mengacu pada kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan yang telah disusun. Tentunya pengembangan kegiatan operasional tidak hanya menitikberatkan pada penyusunan kebijakan, tapi juga harus memperhatikan kaidah perencanaan berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, memberikan tempat yang lebih terhadap fungsi-fungsi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta sinkronisasi program/kegiatan lintas sektor.

Sebagai penutup, apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra BKKBN 2020-2024, maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimanamestinya. Perubahan Renstra mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra, perubahan struktur organisasi/kelembagaan dan/atau tugas dan fungsi BKKBN, serta melalui proses telaah/evaluasi serta mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan/atau Kementerian Menpan dan RB.

Matriks Rencana Strategis (Renstra) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Tahun 2020-2024

Stwint Wilefles					
Unit Digarrania Felaksana			BADDAN KEPERUDUKAN DAN RELUKASA BE PE PICANA PANSONAL (RODAN)		
	1024	4,556.081.	4,556,081,		
United Bugsaful	Stot	4,314,826,	4314,026. 57		
Mokard Pendansan (Dalam Inta Bupiah)	2002	87 87	4,150,139.		
Alakari Peru	tæt	3,857,754	3,857,754. 78		
	9000	3,381,554. 06	3.581.554. 86		
	2004	(5202 (5202) (560)	12	02.61	7.40
	2003		\$1 2	25.03	3.76
nese	2022		173	N 23	808
Tanget/Sasaran	20021		27.5	62.16	8.8
	3020	11.11 (2003- 2000)	**	W 111	8.60
	Base tine 2019	PP1 2015-2045	2.4 (Spi0.280?)	57,2 (1000.2017)	10,6% (SD0.2017)
	Saturn	Person	Natio Aura Analé Per Waneta	Person	Person
Indikator Dampak/ Indikator	Salaran Strategiy Indikater Salaran Program (Delcemen) Indikater Sajaran Registan) Indikater Ostput	tedhare Dampak (Jerpart): Laja Pertumbalan Pecahdak [199]	Entrange. Angle Settlera Total (Total Fedity May TRI) per Wife visa 13-49 Talan	Anglas Providensi Kontrining i Mudern Kaladem ContrinogibrePrevelance Fanc/in/(P/I)	Peruntian behalahan ber-10 vg tidak terperah (Univer Merd)
i para	Samma Program	-	= -		H.
Sampak (Impact)/ Sammar Strabegis/	Sauran Program Outcome!/ Sasaran Registrary Relustran (Dutpart)	Dampak (Impacri): Menaranian (ap Perturbahan Perturbahan	System Southight: Menurankan Angka Kelahiran Total	Meringkafian Angka Provalensi Kentrasepsi Medern	Menurankan kebutuhan ber- 10 ng tidak terpenah
Saw	9.7	=		a	5
	Program/Register	Sodor Kepredoddan Kepredoddan Berstram Rasend (kooni)			
	ž	850			

							Program TEAMS (Beregos	Kencana)			
			1,355,090.								
			1,288,090								
			1,286,104,2								
			1,133,174,1								
			1,065,320,								
Ħ	61.00	1111		11	6341	7.40	2	\$1.00	22.1	8	30.0
20	90.55	72.1		3.13	65.93	2.30	98	39.00	22.1	£	grae
n	28.780	22.0		17.2	25.23	89	ı,	57.00	22.0	2	0.00
z	88.00	277.0		W 22	62.36	8.30	ž.	55.00	22.0	2	9 %
32	25.02	21.9		2.36	64.78	8.50	×I	25.07	21.9	8	200
36 (50812017)	53,57 (Sarve(PR)	ZO, K (SERCECELE)		2.4 (50602007)	57.2 (50802017)	16,6 (Sant par.7)	36 (50812017)	53,57 (Sarve(PR)	26,8 (SDR120L7)	z.	2
Kolatkan por 1100 WUS 15-19 tahun	Indeks (Skala 0-100)	Tahan		Auto-cata anak per Wambu	Person	Persen	Restriction per 1000 WMS 15.19 talium	Indebs(Sula 0-100)	Tahun	Person	Person
amor 15-13 tehan jAge Specific Pertifity Retri/ASSR.15-19)	Indoks Pentanganan Kebanga (iBenggal	Median Dila Esote Portama Pormipuan (MURP)	indikator Sastran Propon Bangar Sencoria	Angka kolatinan total (Total Sentity Sans/THS) per WUS usia 15-49 Tahan	Angka prevatensi kontra sepai modern (Alfortera Controcaptive Prevatence Apterins (PR)	Perventase bobatulian ber 40 yg 6dak terpenalti (Unmet Akeut)	dogka kolahiran remaja amor 15-19 tahun jage Specific Fortifity Reme/Asi# 15-19)	indeks Penbunganan Kehanga li Banggal	Median USA Kawin Pertama Perempuan (MURP)	Persentine SDM Apprahar dan Teruga Program yang Kampeten	Persentase Recipionas Internacional Bangaa Kencana yang dan plementasikan
	46	a		н	7		-	×			ia.
angka kotatisan remaja	Meningkatkan Indeks Fembanganan Kebanja	Median Usia Rawin Pertama Perempaan	Session Program Bangpa Kencana	Moringlathya kualitas penyelengara- an Program	Bangs Rencas dolar peringlatan kaalitas	Manusia Manusia Informatio	upers Recches Mental dan Perebanganan Rebutayan				
	n	a	=								
			Program Fembanganian Koluanya. Kopendadahan,	den Kelsanga Bermusan							
			_								

						κήτ	MAL	RPIMM	
			Deputi Bidang Relaunga Sejahtera Dan Peniberdayaan Koleana IKSPRI				Direktoral Bina Releanga Balita Dana Anak Dana Anak		
	21,315				2,958.27				
	22,624				2,748.11				
	20,777				2,611.45				
	19,601				2,463.67				
	116,452				2,328,22				
87.0		61,00	22.1	2		ĸ	6,122,794	42.68	62.68
0,0		29700	22.1	R		æ	4.222.744	41.68	41.68
0.18		57.00	0.22	24.0		s	4,122,784	40.62	40.68
0,00		55.00	972	36.0		s	CC223H	39.68	200
75.0		53.57	21.5			5	4,322,786 4,322,784	38.68	38.68
72.3		Sacret/PR)	30,8	29,9 (Nikesalas 2018)		9	2,831,616	17.64	32.08
Person		Imdoku (Skata 0-100)	Tahun	Person		Person	Descrip	Person	Person
Peruntan Penanfadan Hasil Penelitan dalan Penentan Rebijaan Prajam Sariga Koncara	Hollistor Sasaran Curconne (Loekin I):	Indeks Pentungaran Kebanga (Bangga)	Median Utla Knein Pertana Perempuan (MURP)	Personing Stanting	fodkator Kinorja Keglatan (Esebas III):	Personia ye Arak usis 0 - 6 tafan yang esembli perkembangan yang baik	Newtich Sotherge yang meestikk Sother pada Belas principes yang Belas principes yang serkigantan princes dan Kif Fengsochan 1000 FR Colam strayks pencegalam strativy	Personae feluaga sang nedabamban pengabamban pengabamban pembandah baraba	Maturan Contport Peringkatan Internation foliasing status pengantan dan pendampingan anak dalah sengka pemberinian karabin
0.	TV V	-	*	en)	411	e .	*		Managara Sempand Sem Sempand Sempand Sempand Sempand Sempand Sempand Sempand Sempand Sempand Sempand Sempand S
	Sastran Outrone (I selon ()	Messagadom Kelsanja yang Manditi, Teoroos dan	hellogija Gelearga berkusifarij		Sastran Kegistian (Todon II)	Susaran Englatan: Maringkatnya kemampaan kebanga dalam	pergasthan dan pentampingan anak dalam rangko pembentukan karabor		
	2				411				
	Bistary Ketuarga Sejahera dan Presberdayaan	Rehongos			Penthinaan Kelenega balita dan Anak				
	4				-				

					REIMIN	821MN			
						Direktorat Bing Ketchanan Remaja IDITHANREMI			
				13,855.68					
				13,073,40 13,855.68					
				11,63150 12,331.51					
				10.975.00					
49.02	34.51	314	31.50		uu	26.69	n.n	37,46	20.00
88.02	24.01	020	91.00		an.	25/69	E S	35,46	25/6/2
47,02	25.52	8	3,8		26.72	68:92	N.72	33,46	25/20
166.02	23.01	98	20,00		76.22	18.42	ž	31,46	2777
45.02	22.51	300	49.50		18.72	67.92	25.22	29.46	\$7.12
44.02	1022	901	49.01		ę.	10.00	ę	27,46 (2,294,700)	÷
Person	Persen	Rathupeten/kota 150	Person		Indeks (Skala 0-100)	Indeto Esche 0.100)	Indets (Sada 0.100)	Personale	Indoks (Soda 0-100)
Persentase lochargo arak esta 0-5 tohun yang reenggana-kan KKA stan RMS	Persentase beluntos anak asia 5-4 colum yang neregama-han KRA	Amilah Ratapaten/Kota yang andaksura- kan pendataan pengasuhan 1000 HPK dajan rangka pencegahan stuniya	Peruntan Kelanga Balta dan Anak yang But 1163	Indibator Unorja Kegistan E selon III:	todeks progatalan kolonga yang ro orođer romaja	Indeks karakter remaja	(L) tefanism) Octobe: Peningkatan ben ampulan keluaga dalan pentampingan masa perkembangan masa dan penguatan banden	Persenta se behanga Rat pershinaan Bina Kebanga Komaja (HKK)	(2) Koleanan/ Output: Fergembangan kanakter remuja yang berkusaktan
E	75	51	1.4		podeks britany remaje	tradeko	(1) Teksaran' Ostpar Nemanpulan keluanga pendampingan mala perkembangan rema perguatan karakter	I	(2) Koleanan'i Output: Pregrenbangan kanaki yang berbualitan
				A1.2	+	70	(1) See a se		Prougs Variety
				Sawan Registan (Foston III)	Szszran Kegistan: Mesingkatnya kemampaan	kehaga dan pendampagan mata perkenbagan	prografian		
				A12					
				Pershaan Geshanan Benala					
				N					

		KV	5		MARTER				K/II
			Ketuhanan Ketuanga Lamba Dan Pentan	(DITHARLAR)				Groktorat Pemberdapan	Keknega Keknega IDIPEMIDNI
	2,599.19							3,956.68	
	2452.06							3,732.15	
	2,313,27							3,520.89	
	2,182,33							1,321,40	
	2,058.80							3,133.58	
21.857		97.00	10.00	4	2al	99766	39,000		×
20.836		9579	10.50	a	2	38,000	54.000		8
19.825		90'09	11.05	3	2	57,000	57,000		Ŧ
13.88		95	2,11	2	12	500'95	800/95		s
Lacot		59.00	12.00	ä	а	900'55	35,000		Ħ
18 694		59 95	6221	я	E	187.784	51,724		×
PIK Remaja		index States (0.100)	Indeks Skata (0.100)	Person	Powers	foliante	foliumpa		ndes
Cakupun Persyebalkusun maseel/informasi Gente dalam permentahan karakter remaja (sesual karakter remaja (sesual	Indikator Kinecja Negistan II seloo III:	Indoks Lamia Tanggah	Indeks forentanan Kehanga	II) Bekanani Olotputi Peringkatan kualitan telapi tansa melaksi perolampingan koluarga	Perventians Scharga yang melaksanakan pendampingan hagi karala	(2) Soharien' Output: Peringkatan koalitat fidip kokarga tertuer melahi kokarga yang rengakars Pros.	Junito kekanga yang mengah wes PPGS	Indikatur Dawpi Registan II selon III.	Indeks Komandinian Domini Seluarga
Ħ .	A1.3 Ind	Ī	P 53	II) Kelearan) Output kualisas kidap Lansa melaksi pendampinga	Ŧ.	(2) Solvanial loadinas hidu melabri koloa PPIS	12	A13 ind	De G
		Senaran Kegistar Meringkatnya	haritar helup 2 larsta dan kualtar	ingan dan inbp		2352	e e		Sogisteen I Meringkalmys
-		Sequent Registum Meringk	hualtarh Ipostr der kualtor koleano	restan in pendang holisaga holisaga netan					Separan Registran Meringk
	A1.3							n A1.5	
	Pembinaan Ketahanan Kelsanga Lansa	dan Rentan						Pemberdayaan Bonomi Kebanga	
	m							*	

	MMAN							MATTER	NP INN	
				Deputi Bidang Pengendalan Penduduk		*		Direktorat	Prencanan Pengendalan Pendadak (DITENDAS)	
		10,412.35					2,307.86			
		9,840.50					25,073,22			
		1,285.87					2,053.99			
		4,758.57					1,587.72			
		8,762.61					1,828.94			
6,630,407	12.7		Ę.	61.0	20.	900		100% Frav & 455% Költykota	0 18	100% Provies
6,991,846 6,691,902 6,657,122	12.2		2.19	0.65	88.0	40.0		725 Pose 6 285 Cab/Sota	75.0	No.
6,624,002	17.5		172	57.0	979	30.0		60% Pres & 25% Kalykota	68.0	AUN Provinsi
4,593,946	11.2		2.38	98.0	525	20.0		COS Pos AZES Calcitora	900	45% Provinsi
6,558255	10,7		320	53.0	31.8	10.0		10% hor & 21% Est/York	36.0	30% Provins
6,525,627	202		2.4 (SDR12017)	51.0	-	- 2		7	101	-
Kelunya	Persen		Bata-cata arak per Wanta	indeks/TSkala 0.1004	Index (Sala 0.100)	Person		Paramo Percentals Dancas	Person Bursé Data Rependablean Patherna di Kampang KB	Person Person Decret Precing
Intransic Octool: Peringbalan perchangunan dan bengaharaan belaanga	The session of the se	Inditiator Sasaran Datoona (Ewlon II)	Angka ketabisan tetal (Fasal Fertility Aute/TIR) per WUS asia 15-49 Tahan	Indeks Penthangunan Berwakasan Kependadakan (PBK)	indeks kepedulian terhadup tsa Kapendudakan	Personase Kanpung 88 mandiri	Indikator Rinerja Kegiatan (1 selen 10	Persents or Pennehilah Charah yang mempenganakan GDFK orbogai sudah sahi dasar pencesanaan pendenganan daerah	Persentae Panel Data Rependinhken Perpera yang Internit di Respong ID	III Nelsaran' dutasi Penantasan GPK ebagai alah sara dasa tebgikan prenciosan pembaganan daerah
Sombargo pombargo interpa	2	10	4082	200	w = 2 m	4	81.1	=	E E S E	11) Kehanan debati P GGP K sebagai salah san kebigkan perencanan pembanganan daerah
Nomandman Ekonomi Heluarya		Sasaran Outcome If selon III	2 × 0 .	production production production			Sewann Registern (Todon Re	Sassean Registrate Meminykatnya persanfastan data dan informasi kependudakan	dan keleazga webagai base pengeldaan pembanganan kependadakan	
		2					11			
		Bidang Pengandalan Pendudak					Pergendalian Pergendalian Perdodak			
							an .			

33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3	20 Proximal 8, 45 216 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235	75.6 80.0	95.0	95.0	75.0
53 Prevind, Provind, 250 Kath/Nexa Kath/Nexa	13. 20 Provint & Park 14.0 18.0 (14.0 Provint & Park 14.0 Provint	0.00	0 B	90.0	0.00
33 Provinsi 270 kalti/kota	11 Fronting & 110 KalyNesia	0.05	70.0	9 8	900
(Data & KORA)	30 Free, 246 Falls, 69 Korla sudah menjaraan GDPRI	ę.	e N	ş	n ju
Previnsi, Kally Kena	Prestinal Nath/Resta	Person Numer Data Reproduktion an Perpuma di Kampung 10	Person Burish Data Rogenduduk an di Rampeng AB seng telah dengkerasi	Person Numeri Data Kapenduduk- an di Kampeng 33	Person Bursh Data Kependuthk- an di Kampang Kib
Jamish Peacelatah Daesah yang mengasan GDPKS Pitar	lembh deren sag meretaplan pennetaplan pennetaplan pennetaplan genetaplan dan kejerdudakan dan kejerdudakan dan kejerdudakan genetaman	12) Nelsanani, Output: Pembernikan Nelsani Cuta Nepembidikan Parjuena di Sampung 10	Formation Formation Repended Material Formation (BY yang right terbestork dan dingists and	Calapan Parach Data Kependadakan Yang mendapatkan mendapatkan kelola	Categorn Burnath Data Data Data Varia Generalisation varia demarkankon varia protectoraham dan protectoraham dan protectoraham dan protectoraham dan
<b>=</b>	23	(2) Nebarani Output Pembe Bundi Dula Rependuduan Parjuena di Sampung 88	12	77	3

35 U			W.		
			Direktorat Sor jangana Pendelihan Kependulakan seriori pendulakan		
		2,681.20			
		m.ma,t			
		2,350.06			
		2,217.60			
		2,092.08			
23 Propinsi 25.7 Kala/kora	17 Province 25.7 Kaltykora		170 SSK	300%	nance
33 Posima 205 Kab/Yora	205 205 Sah/Kota		136 SSM	S .	8
33 Prodins 154 Rab/Nera	10 Prov 154 Kah/Nota		102 558	Ŕ	ž
55 Provins 208 Kali Kara	7 Proximal 103 Kaly Kota		\$5. as	š	× 59
33 Provinsi 53 Kabi Kota	3 Posimi 53 Tabyliota		88 88	ığ.	ğ
ž	ž		ž		
Perula Prov atas Kab/Kota	Penda Provinsi 200 NSA/Kota		SK (Selostan Sega Rependedat- and	Persen	For seen Frontiers yang in mentandengga rakan pendistikan Rependistikan an medala 3 an medala 3 menformat hen format hen format hen format
innelit köösepak Keija Bungga Keija Bungga Keisana vang mendapatkan mendapatkan mendakanakan adoleka kelijakan pembanganan pembanganan danah	ternalsh Possenintalsh Downsh propriet Govern Propriet Govern Possenintalsh Possenintalsh Possenintalsh Possenintalsh Robert Possenintalsh Robert Possenintalsh Robert Possenintalsh Robert Possenintalsh Robert Possenintalsh Robert Rob	fedikater Kinerja tagjatan (Teelan III:	Auminish inceltors Fernifichian yang Mempiringiya dabar materi presidelahan keperateriahan dengan keliraha pengasersa	Petuani Ostpati Calupan petak sensan pesalahan Rependudakan Pemal, non femal dan arbemali	Cakepan periodicugos am kerjo sama periodicidan heperiodicidan in class plan in central, dan anformat, dan
	72	_	Mental trott Produkan y Mentartogra produkan kopenduka ketena pang	Keluaran Gerputt Calup pelak seraan pendidhan kependudakan Jomral, a dan internal	7
		1	-	Februar petak kepan danan	
		Sastran Kogistan (Endon Ille	Sessan Registran: Meringkathan Ingestacian Ingestifica iestites	pendelkan kependudukan	
		977			
		Ker ja sama Pendidikan Kependudukan			

	NEWAN	15					
	Distances	Aradius Dampuk Kapendudukan (DITDAMBUK)					
2,7107.55							
2,629.76							
2,440.93.							
2,340.48							
2,208.00							
	100% Proceing & 50% Each/Nees	0.02	100%	100% Provinsi, 35% Kab/Kora	0.08	Jans Proxinsi, 90% Kab/Yutra	\$65 5
	755 Process & 405 Nath Kees	25	桑	98% Provinsi, 43% Katu/Kota	35	100% Prodins, B0% Kalv/Nata	\$6
	Edits Preseinst & 30% Rath/Rates	82.0	103	70% Provient, 35% Kabi Kota	21.6	190% Provins, 70% Kab/Keta	É
	45% Provinsi & P 20% East/Yens	¥	\$5	60% Prozensk, 25% Kalti/Kots	8	100% Provins, 100% Rab/Kora	502
	20% Provinsi & 10% Kody/Keda	45.0	É	40% Provinsi, 15% Kabi/Kota	45.0	190% Provins, 90% Kab/Neta	×S1
	*20	42.0	ş		42.0		
	For sentace From sentach Dancach	Person Various III	Persentan Penda Provinsi	Personance Personal diseration	Personane Kampang KB	For sentate Percentals Darrate	For sentate Mitra Soria
9.1.4 bidikator Moerja Kogistan (Eselon II)	Persenta de penentintali ilianale yang melok sanakan Sistem Peringaton Disi Pengendalan Pendudak	Persenture Kampung Milayang molak amakan penanganan terpada ina kependadakan	(1) Vehaman / Oxgour Penyadiann sistem perhyakan den penyasidahan pendedak di fingkar Provinsi dan Kali-Kota	Calegorii Pernerintah Barrah yang mendipahkan Hushinak pernerintan atem pernerintan atem pernerintan dist	(2) Keharan / Outkur Pengsatan Kempung 10 melaks penanganan terpata ini Rependadakan oleh Binas sektor	Collegan Premaintain Bacath yang mendapathan Badhasi Badhasi pendintaan pendantaan pendantaan kerpendantaan kerpendantaan	Caleapan mitra kerja yang mendapankan Saditasi prembinaan prembinaan
trades III	Personal Property of the Personal Perso	Perse yang general Repos	Marrany Or peringati dask of fin ota	7	baran/ Ol mg Mine brine bepo	12	27
9.1.4		n.	(1) Keluas sistem per pendisdak Kals/Kota		(2) Selsaran Kampang M terpada Iwa Binas sektor		
Sasann Sogiatan (Codor: III:	Sesean Rogistae Meringkatnya Rapadias dan Rapadiitas Rofembaguan	datan bidang pengendalan pendeduk					
813							
Analisis Dampak Kependutakan							

							RPIMAN	
			Deput Bidang Kelaanga Berencana dan Kesehatan	Reproduksi (stasta)			Orestor at fine News tan Ber- 165 stor	(опалети)
	48,616.41					40,911.98		
	45,884.54					38,596,21		
	43,768.45					56,411.52 38,596.21		
	46,419.27					34,350.49		
	58,508.75					52,408,12		
		63.41	7.40	28.39			25.00	25.00
		62.93	27.00	25.02	R		67.70	61.72
		35.23	8.00	26.75	п		28.80	20.00
		91.79	8730	25.93	8		46.12	46.12
		61.78	DE ST	35.11	z,		23.48	22 #
		57.2 (SB40.201.7)	200.6 (SDMC 201.7)	23.1	36 (SDRI 2017)		30,52 Chathatik Nation (Boolean)	SO SZ (Statistik Natio (SSSBN)
		Person	E 2	Porson	Rolabi an per 1060 Wils 15-19 tahun		Persen	Person
torpade to Terpendiablean di Kampung KB	Indicates Searces Outcome (Colon I):	Angka prevalensi kontra ospsi moderni (Maden Cardinospikie Prevelance Anrefin CPR)	Persenta se kebuluhan ber-88 vg 164M terperahi (Licener Alend)	Personata Prverta III. Akrif (PA) Metrode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKEP)	Augka Nelahiran remaja umur 15-19 tahan (Age Specific fertaky (Ame/Ast# 15-19)	holikator lilnerja Kagiatan (Tadon III):	Presentate Faithtes footstam Faited yang dap militarati 65 Millio	Sobue au/ Output: Perntinuan Terkos dalam pedagaman 30 dan penterahan keterenduan aleken di Tejere
	1		2		-	3	-	Fodustra Feders d Poment Foders
	Sasaran Outrome (Fodos II)	Mestnykatnya kewitaan kekanya dalam Kokanya Boroncana dan	Designation Suproclaise			Saratran Sagistran (Codon III):	Sestion Register: Meringlating Meringlatings Folker diden Peleparan III	
	đ					5		
	Bitlang Koluaga Berescena dan Kesebutan	Reprodukti				Peringkatan pembinaan ke-sertaan her-	98 plant permetintah	
						pı		

			илин					BFBMN	ş	*
			Develoral fina Kesertaan Ber- NB Later Swarza	(DOTANSAN)				Direktorat Bina Kenertaan Ber- 90 John	Withyah Dan Sasan Biosas (Dittatsos)	
		2397.53					281787			
		2281.86					2,658.36			
		888172					2,567.89			
		Suran)?					2,365.93			
		1,899.10					3,252.01			
75.40	я		sua	MLIT	33,216 (38% dan 64.01)	74.17		##	NE.75	57.5
72.00	3		22	Mude	25.894 145% dari 64.4311	70.00		19.16	mm	3.53
58.00	91		1	gra gra	28.572 (40.% dail 66.433)	88.59		16.76	36.75	ā
10.00	8		22	nt.67	23.251 (35% (25% (25% (25%	61.67		# 15	r r	9
62.50	8		113	37.50	19.929 (30% das (6.43))	57.50		W.78	£	6.93
SERB (Scatistic Scato BOSM)	72		3	200	1,419	233		32,56 (fhallagy?90)	24.75 (Dallap 2000)	(1)
Person	in the same of the		110645 (State 0.100)	high	Tenga Kesebatan (Kematetti)	Hiddes		Person Breatan breat	Person properts 135	Person personal (B)
Persentane faskes teregister vang merendagat Aleken MILP	Persentace nanuln salet yang prelayanan 18 nya meningkat	Indicates three polygonal til selen til	nateks internasi Menade 18. (Mechant Information Antesy/MII)	Solve any Carpust Prefespheries Souther pelasaren 100	british fenga Pelapanan mentagatkan mentagatkan kasitan kasmpelami (terutaki)	indeks kealitas Pelayanan IB Berkuafias	Bridsuler Kinerja Keglatan (Esslen 10,	Persentans lecentain (d. 100 kat/data despira despirado (d. 100 kg.)	Persentian forestrain (B Solitaga Pessentra Bantian bran (PBS)	Ferentian-besetaan IB Fila
=	22	_	Mark States	n/ Octyo	I	17	_	Person de 100 kesseth Frox!	Person Johnson Barma	Persent File
		C12	40	Solution			Ð	+	*	-
		Sasaran Regaran (Esdon)));	Sascan Registern Weringkothys Raditas	D interference			Salaman Registran Madamilia	Sastran Regulan: Meringkathsa Resentaan RB di Willoods dan	Sastran Beras	
		(7)					8			
		Pembhaan standarias kapasias	femaga kersebatan pelaranan kBktt				Peringkatan Kesertaan IB di	water House		
		10					п			

					1/4	NEWN	
						Beeksrat Kesekstan Reproduksi (DITR SYNO)	
				2,488.99			
				2,348,10			
				VALLE,			
				ON GRO'E			
	_			nemen			
20.00	21	1	*		153	40	90
39.46	a	*	ğ		16.0	.#	*
# 35	98	e e	316		16.5	я	2
38.46		4	R.		17.0	Ħ	B
37.98	(a)	N	298		19.3	£	22
32,36 (Dallap/PKI	(#)		156 [Laporan Pervoklan bicon Pravinsi		17.5 (SIGAP 2019)	2) (Follow Gar Postatro)	27 (Perkon dan Pundatin)
Perum Kewetaan See-58	Provinsi	Persentane Kabupaten/ Kota (Kumalatif)	Prosider		Person	Peram	Person
Melecan Organi Perugkatan Keseraan IB di ndawih dan sesaran Kesara	Nembeh Fasilitani Pembinsan Kesertaan 18 di wilayah dengan Kesertaan Sondah	Persentase Fasticas Pentinisaan dan Pentinjahan Pentinjahan Kovertaan NB Pbi Persentaan Persentaan Persentaan	hamlah Provider Vanaktomi yang melayani	Profesion Street is Registran (Tweken II):	Personias behamilar yang ildak dingolam jerinj	Personal se Pelandram (B) Personal subman	Neberrany Output: Peningkatan pelayanan IB para: pensaknan
rany Ourpa saam 89 di s	1	2	2		Variation (	Person	nan' Outps man 185 pu
Kelence Kerserta Kharar				5	g:	74	11
				Sauran Segistan (Celm III	Sasanan Registen: Meningkatnya Reakton Residatan	Reproduks	
				\$T.			
				Poningkatan Bualitan Resebutan	Peyrodaksi		
				n			

							1,5	1/9
			Deput Many	Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPINI)			Drektorar Arbokasi,	Romanikayi Internasi dan (dakasi (DITV DRICIM)
		108,168,50				43,521.87		
		101,989.15				41,658.37		
		96,159.58				36.542.80 38.73431 41,058.77		
		30,659.98						
		86,471,68				34,473.40		
*	25		r.	50.00	7.40		22	20% The Artisches Rodelini Reinfloss
Ħ	47.0		30	함	7.70		30	NO. S. To- Administration provided Agen- Salar School
9	021		59	23.10	8.00		59	No. 17 Per l'Internation de l'American de l'
ß	992		9	95	2		9	Appendix App
2	120		S.	25.79	8.60		2	20% The Address of Percentage Care- Const.
46 (PK 2013)	N/A		56 aw 2015)	28.9 (506.2027)	10.6 15.005.0020		ISTOR ARKS)	20.9 Tim Advantages provint day Adar/fora
Free	Sab/Rota		#erson	ğ L	Person		Person	Prome
Persentose PUS dengan kehanilan ntske thggi (4 Teclah)	lembh kab/kota dergan PRR/PLIB yang pu Areanas di witayabnsu mekayani RB Puscapersalinan	Indikator Saszum Program (Eselon II:	Personase masyarakat yang terjangkas Program Bangga Kencans	Persona se thighat patras pakis pemikaian kontra sepa (Brop Out/DO);	Persentan kehatahan ber-IB vg tidak beperuhi (Joner Need)	Indikator Kines ja Negletan Esekon III.	Personitase manya akat yang te jangkar Program Bangga Kemana	Presenta e Stokeholder rang sterihildang Program Benga Kercana
7	72		Person yang Banga	Personia paka per kontra se Out/00)	Perse Ber 8	_	Person State Brade	Programme Progra
		0.3	H	A .	н	170	H	rs .
SI.		Sestran Outcore (Esdon I)	Meringkatnya cakupan dan kualtas advekas Kit.	Popering bornells man bloom ja protogas lisi lapangan dan proquelskaan	smart data dan informasi melalui reknologi	Sasaran Kegistan (Fsdon II)	Sauran Kepatan Meringkatnya prengatahaan aksartan	prilatu menyarakat dalam Program Bangsa Neoram
		6.0				0.1.1		
		Bisking Advokasi, Pengjasakan	dan Informasi			Peringkatan kepedakan dan peran serta mita akeria.	penangka kobijakan, dan masparakat melahi Advokasi dan	<del>ŭ</del>
		٥				п		

						RPIMM	
						Dirokineat Pelaparan Dan Statistik	iomarno
					6,567.65		
					629023		
					A504.18		
					BCB053		
					5,281.49		
20	70%	401	102	20% Tim Actoclask Prodent dan dan Katol Kons	Ì	20.05	w
R	809	É	\$0\$	60 % Tim Actorical Profession dem Neshfaras		1599	æ
9	105	É	30%	2d N. Tim. Addedson's Provernal don- yout focus		1919	Æ
9	40%	\$59	404	450 % Thr Authorized Proudcad Option		65'09	n
55	Nik	\$	if R	XOB TITM Arbedouri Fronkerif dan faab/kess		097.50	2
50 1964P 2019)	509	r/s	30%	20 N Thm Advolved Proxing dan Gab/Kera		53.05	w
Por sen	Por sen	Per sam	Porsen	Porsen		lodes (Sade 0-100)	Sabrádom
nesserent October Frankrich Frankrichen Frankrichenge Kencena	Personnan persobationan materi SE Fragram dangal Mercana wasal seprentiasi, seprentiasi, seprentiasi, wasanan dan wikisati	Personaus persysbaritansun materi Kit Program dangai Kercana dalam rangka pemaruman unonstrand	Personana personalizatan sarana dar media RR Pregnam Banga Kencana	Preventions Tim Advisors Tempation Frequent Section Frequent Sections Services young medication and sections	Indikator Growp Segaton If select Ift	indeks Kualitas, Bara dan Informasi Program Bangja Koncuru	Rekuran/Output: Peniaritatan delen pencalatan dan pelanuan dari dan lefumosi Pragam langsa Rencara
rayoupa raket data ma	3	77	7	*	_	Hadek Haform Banga	ray/Outpu a pencatat dan teform ens
Reference Reference Reference					0.1.2	н	Sebaran dylen pe data dan Rençana
					Southern Registern Crotor In	Sasan Rojatan Mewijadkan Sasan pencatatan dan	polaporan statistik yang berkualitas dan terintegrasi
					FTG		
					Peringkatan kualtor data dan informasi	dalam sistem informasi beleazya Prayam famasa	Selection of Selection Trapistan Whapate
					2		

		REIMM				ş				
		Drekberst films Und Lepangan	(Jermann)			Direktorat Teknologi, Informasi Dan Dokumentasi (JITIF DOK)	X			Direktorat Bina Hafnangan Antar tembaga
	3,979,96				52,843.50					2,355.33
	3,751,68				48,832.36					2,0555.52
	3,542.15				46,030.53					USBERT
	3341,63				43,558.42					1,309,12
	3,152,50				41,857.00					1,2907.38
2		82.0	ğ	6.8		1900	160.6	an.	×	
((8)		75.0	11.57	75.0		T g	118	91.	a.	
×		10.0	2000	70.0		ŝ	8	:1 <b>5</b> ):	*	
*		88.0	88.8	85.8		12	824	-en	*	
.8.		60.0	enu	60.0		2 KS	36.5	্ৰা	x	
×		\$6.0	35.0	35.0		age.	70.6	п	x	
Proxing		Person	Person	Person		Posen	Forsen	Apthas	Provins	
Amilah Pengakkian dan persahkatan data dan intermasi Program Bangja Kencana yang	Indikatur Klowja Kegiston (Eseket II):	Perventare Perpatah Kili vang berkinerja hak	Kolesani, Output : Peringkatan Merija pemplah 30 dalam capalan Program Bangga Kencana	Personalism Personalism (PLVI) yang terampil melaksanakan Tapoksi	tedicator through Kegisten (Turber II);	Persentan Applicatives, your terinograf datur sette pertal datu dan informasi BSDM (dustriound Sangga Ferrano)	Relearant Clatpat Lalpanan persantaatan sistem tehnetogi informasi dan komunikasi	kuntah pengembanjan aptikan	Austich Pergebisan dan permanfastan Debamentan dan Informati Program Bangai Sencana	And kator Mareta Registran (Curbon St.
2	Indicator IS (Essent II)	Person!	/ Output empaleh Bangga	77	Indicator to Claden III.	Ferson terroto portali BARBA Bargas	/ Cletport atan ant i dan kos	2	12	Indikator III (Curlen III)
	0.1.3	-	Releara Mineria p Program		0.1.4	+	Soloana percarla informa			0.1.5
	Sesaram Neglatam III welon III:	Sautran Registern: Meringkathyn kompetens	Tenaga PHB/PUSB dalam Pengelolam Pengelolam	Kencara	Sasaran Registan (Eselon II)	Sasan Registan: Mensipakan progrishan progrishan Ranga Rencina yang	berbasis reknelogi informent yang berkunitan	ingketan wikyah		Separam Neglatarr III selan III:
	DCT.3				0.14					0.1.5
	Peringkatan keaktos dan keamitas	Sueber Daya Manusia (SDM) Emilapangan Program	Record			informasi dan dekam mitani dalam pengeldian Program Benga				Peeingkatan kualitas jejaring nistra kerja dan
	22				16					

Ş									Š
(OTRIBNIUS)						Dopari Bidang Petathan, Pengerahangan		Paret Perdiffian dan	Pelatiban Banga Kencam (PULAF)
				186'76				5,7907,87	
				18,561				7271.20	
				107,227				596379	
				20,969				600034	
				19,782				6,195.04	
68.5	413	36.0	45.0		2	98:0	87.0		8
110	41.5	34.0	43.0		82	RS-0	84.0		22
***	30.4	32.0	41.0		ş	an.o	83.0		99
87.5	37.6	300	989		45	25.0	78.0		9
र ग्र	15.6	28.0	37.0		30	anr.	75.0		30
2	en en	25.6	38.4		E.	, g	133		n
Person	Persen	Person	Persen		Parsen	Person	Person		Person
Peranta ia strietissiece/penangia supentingat dan nitra berja yang beptera neta akif dalan pengelelan Program flanga feresara	Rehat av Output : Nontimen den peras serta stakeholden ylmina ker je vang mendukang apera denal Prog an Banggo Rencara	Personiase Mon/PES yang di tindakkapit unit kerja di BRIBRI	Retentings on Retentings on Pergentation Ferdudak dan 10 di Kab/Nota yang berbestak Disas utuh	Indikator Sasaran Outcome (Tsalon I):	Persentaw 50M Aparatar dan Tenaga Program yang Kompeten	Persentano Kerjasana belemakonal bengga Kencara yang dikupiken esta dkan	Persentian Penantiastan Hasil peneltian dalam Penemian Sebijaan Program Bangja Kencana	Indikator Khampa Registan II selon III.	Persentare Petentu Oklast veng Mus dengan kangori balil dan sangat balik
Persenta e stratectosio superatinga leria yang aktif dalam Program fa	Referent and Output: Nomiting per as set is stakeholdensy for je yang mendukang opi Program Banggo Rencora	1	2	Datos	Persenta w dan Tensga Kompeten	Perser Botem Renca dample	Person Penen Progn	-	Person Transpla
-	Robust person berginy Progra			ij		n	<i>m</i>	7	Ĥ.
Salaran Registern: Meringkatnya kemitmen dan peran setta mitra kenja dan peranagku.	seturah tingkatan seleyah dalam pengelekan Propram	Nencara Kencara		Sastran Outcome (Forler):	Messigadian SOM Aparatur dan Tonaga Program Bangga Kemcama,	Persitian dan Pengendangan, serta for jesena internacional yang bertasaktav		Sawran Kegiatan (Esdon II)	Sassean Keglaton: Meringkatoyo hetersodaan
				1				E	-
pemangku bebinkan dalam penguatan Program Banga Kencana				Britany Pristitum provintum dan	Pergentangan			Peringkatan pendidikan dan pelaihan	Bidang Kependodakan, Kita seria Ketahanan dan
				4				Ħ	

		υ'n				1/8	i i			
						Parat Polatitum	dan Kerjasana Internacional Bangga Kensana (PULIN)			
					7,429,67					
					7,009.12					
					6,612.38					
					623809					
					3,884.39					
-	2763	Ħ	+	2		8	8	<b>*</b>	9	8
	2508	÷	-	s		Ř	3		(P)	m
r	2296	2	-	ĸ		5	8	e	(*)	09
*	1678	Si .	H	п		55.	R	i i	(\$4)	8
X	1083	N	¥	*		Ħ.	R	Э	787	8
10	2948	Ħ	-	п		3	6 Recipisma Internasional	ī	, <b>m</b> :	36
Layanan	Orang	Lithery Protest	Layerran	Acrel ah Kegjatan		Steen	Person Mitra Internacional	Layanan	Энго	Orang
(1) Yekisarar/ Outpet: Layaran Pentidikan dan Polatikan	hamlah SDM Agoratur yang erengikesti Pendidhan Pelatihan	lumlati Balambay, Provins than Bala Distor IXIS yang Terakreditas "A"	(2) Koharani OutperSalitzal Abrediasi Dalattang Prorims dan Balai Délat KIB	lumlah kegiatan Esiltan akreditat Balatbung dan OFT, Balai Okkat	Indicator Kinerja Kogjatan (T selon III:	lendah pe sera pikulhan dan pendidikan International Sangai Kencara yang berkualitan	Verify certostan als Kentana	III) Yokunan/ Ostput: Lavonan Pendidikan dan Polatikan	Namiah SDM Aparatan yang menghasi Program Program pendidhan jangka panjang laar	hanlah peserta pelatihan internadanal
II) Yeksaran' Outpot: Laya Pentidikan dan Polatikan	1	the ba	(2) Keharan' Ou Abredian Baloth Balai Délat ICIB	72	Indikator Ki (T selon III)	dambh dan per tidena Kencan	Personal or in selection in explanation in explanation in explanation for specime and if	(1) Yekuman/ Output: Layer Pendidikan dan Pelatikan	1	17
TL) Yes		~	(2) Not About Balai t		£13	<del>+</del>	~	(I) Kell Pendid		
SDM Aparatur yang kempeton		Szaran Registat: Meeingkatkan ketorsediaan	Province dan Bata Distar 1938 yang herakreditasi		Separan Registran (Carlon III.	Savaran Registan: Meeingkatkan kualitas	predefican, prefailbar dan kerjasamaintee mational foregas Kencana dalam sengisi	dalam sangka dalam sangka presa BRSBA di Dania Internasional		
		3			£13					
Kesajahteraan Kalaunga					Pergembargan Pelatitun dan Kerjasana	imemasional bidany Rependudakan dan 18				
					19.					

			101	154			
			To all	Perettan ban Pergembanjan Kepembalakan (PUSDU)			
		32,018,18					
		30,771.87					
		90,350.82					
		\$67.003					
		4,762.23					
æ	æ		22	9	(#15)	83.0	es.
7	sa.		52	6	st.	218	~
ŧ	v		333		4	990	N
įθ	М		3,16		tes:	7.0	2.004
er.	æ		ā	*		75.0	170
-	÷		3.T5 (State 1-	13	4	m3	-
Layerner	Dokumen internasional Nobigikan internasional		Indeks	Dokumen	Layeran	Person	herst/ Prosiding Insidendized
(2) Kolkaran/ Output: Levanan Kerja vana kritemarkonal	Amilah dokunan ketijakon/ prenyataan Pogram Banga Rensana di denia Internasional	Indicator Rimmis Registers (Ession II):	hdeks Sepasan Ilasi Foodilian dan Pergenduanyan Gependudukan	Inntal Penelisia dan Pengentiangan yang dibitamban	Referrant/ Ostpat: Leyanen Penelitan dan Pengambangan	Percentase hast percelular Represedudakan yang dimarkashan balk oleh internal BARBN manpan a kerja	Amelin publikasi Naria sulis Smean (KS) had penditian Repechabikan Pada pada pada pada pada pada pada pada
aran/ Oc	12	Indicator R	Total Park	French Shake	V Oetpu en risen P	7	77
(2) Kota Kerjawa		g	¥6	IN .	Park.		
		Sewest Registran (Coolea III)	Sasaran Kegistan: Meningkatnya elektritas parrellan dan			li.	
		113					
		Meningkatnya efektivitas penelitian dan	Rependachkan				
		92					

		49	5			
		Parset Peneditan Dan	Pergembangan 18 dan 15 (PUSNA)			
	3,694.82					
	3508.32					
	3,404.08					
	1211.40					
	3,02564					
et.		121	8:	#	87.9	*
on.		5	e	(2)	9.	1125
N		110		1	0.10	N
8.		777	*	1,25	ě	79
*		9		7	0.45	79
M,GA		3.15(dedis.). 4)	#	141	73.3	N
Laporaný makalah terakroditasi		index	Dolymen	Layanan	Person	larnal <sup>2</sup> Prosiding festivedinsi
Amilah Persettaan Persettaan Persettaahan Pe	Indicator Kner ja Neglatan (Essten Ili	indeks Dopmann Hasil Penditian dan Pengendangan Delenga Berensana dan Pendanganan Kekanga	lendah Penesikan dan Pengelebangan yang Slaksanakan	Nilmanny Oktyber Layanan Peneditan dan Pengenalungan	Personal se hadi pereditan Sehanga dan Bereram dan Perebanganan Perebanganan Perebanganan Perebanganan Perebanganan Perebangan Bibib magam stopshoolimi	Annith publics of Annith publics of SCH place SCH and SCH and S
5		Possible Possible Possible Possible	Freque State	may Outpoo	TT.	1.2
4.	107	æ:	2	Pomen		
	Saranan Registan (Eselan III:	Sastran Segiatan Meningkatnya efektivitan prerefitan dan	perquentiarque Kelsarge Berncana dan Permanganan Kelsarga			
	7					
	Meninglatings efektivitas penelitian dan	pengenhangan Relanga Revences dan Penbenganan Relanga				
	12					

			1/3	MATAN	MAINE	1/1
	Program Sarqija Norsama di 33 SERSIM Provinsi			Bidang KSPK Provinsi		
	1133.548 88	227,527,69				
	1,069,671, 16	155,001.90 197,266.01 206,889.77 217,106.56				
	1,009,388. 26	706,889,77				
	952.566.66	197,266.01				
	893,804.40	155,001,90				
¥			42.68	34,280	30,234	59,000
*			84	12,006	10,214	\$8,000
n			40.68	107'11	10,214	57,600
S.			39.68	979'64	30,215	96,000
.8			33 1%	26,027	100	55,000
NA			37,68 (3.112.430 keluarga)	100,80	*/11	53.728
Laporan/ makalah terakerditasi			Presen	FIR Remaja der BRR	Solompok nici	Kelenga
Amain Proteiting Progeniting Progeniting Profession Release Re	ledkator Monija Kogistan di 33 BKBB Prodriol (33 anti Eudon & Proried):	Bidang KSPK Perwakilan BIDBM Provinsi	Ferrenta se belanga yang metoksmakan pengarahan dan pendampingan pendambingan	lamlah PIK Remaje dan BADI yang mendapat penabimaan Gesite	lamlah Ketampok B.B. Yang Metaksanakan 7 (Tujah) Diesera Lamaa Tangah dan Pondampingan Perawatan Jampa Panjeer Bag	Numbh Retasga yang mangalom IPRS
	2	FB1			*	
	Sagnan Kegistan di 33 BARBM Frovins (33 and Ewlen Il Pravins)	Securion Registran : Meritraplatinys	Poleteanum Program Penbanganam Sebanga, Kapendadan, dan tebanga Senetrana	lingkatan wilayah		
	<b>z</b>					
	Pengololian Program Penbanganan Melunga, Kependudakan dan Nelanga Berencana Perwaldan RESEN Frontesi					
	a					

	5				RP3MM			
=								
=								
				3	2			P
	100	#	g	4,122,9	4,122,7	34,789	901	34,280
	8	ź	8	4,122,784 4,132,784 4,132,786	4122,784 4,122,784 4,122,784 4,122,784	32,686	9	33,656
Ì	08	#	£	4,122,784	4,122.784	11.30t	8	31,101
Ī	2	я	2	4,122,784	4,122,784	29,128	2	29,628
Ī	50 (Sta Eath/Sorter)	#	99	4,122,784	4,122,784	727,83	3	18,107
	*00	я	eju	2,000,614	2,833,614	29,527	470	29,327
	Person	Provinsi	Person	Solvange	Keluarga	PM Remaja dan 8400	Person	PK Demoja das BIO
3	Kabupaten/Bota yang melaksanakan kepistan asaba ekonomi kekanga	II) Rebusur( Output Pembhaan Perbanganan kelampa di sebush Sigkatan elepah	Porsento se kalkoporen/Nota veridi sanakan melidi sanakan poenbasaan poenbasaan kalam rangka poenbarakaan psenbarakaan	(2) folkstant/ Octour Poemos 1000 IPP, padis beluarga yang memiliki hadata	ismlah kekanya yang su eniliki boduta yang tor papar promosi 1000 HPK	(1) behavan'i Dictori: Pergustan Peran Pir Remaja dan Bibli distan Estikasi Secure dan Gid hagi Remaja Parri sebagai Calon Iba	Persentase Statispaten/hoto yang medikisanakan pembiasan Genre (Pist. a/M dan	laminh PIK Fees aja dan BiDI yang melakumakan edakan keupo dan jid bagi eemaja pahii webaja calen itu
Permentana	Kabupate mekaksar asaho ek	II) Keluman/ Outp Perbanganan kelu Ingkatan Mayah	2	e beluarge	12 22 22	can' Doty Chemaja d Gegra dan agai Calon	2	7
		(1) Kelua Perahan Singkata		(2) Kelua IIPK pad badata		(1) Kehua Peran Pi Edukasi Putri veh		

Poles (Tarist Pendi			Distribution of the control of the c		8,822	<del>-</del>	<del>M</del> S
(4) Kahanany Chatpa Pelayanan Namah Li Chajah) Dimenal Lan Pendampingan Pera Panjang Bagi Lansa	4.1	2	(5) Netaran/ Outp mengkati kejata denomi beluarja	2		Para Date para para para	2352
14) Johanna V. Output: Promografiam Polisymmer Remai I manis Melidadi T Taligish Dimenel Lamia Tanggah dan Pendintipngan Peransatan Jangsa Panjang Sagi Lamia	Preventace Kabaporen/Koto yang mendapat perlaksiman diban pelaksiman bisa Kebanga tomba (BRL)	Personness PRS varg mendapakan perilinaan dan badinas ketahanan ketaga rentan	[5] Selastant Output keluaga yang mengkeli kegistan pemberdayaan deenumi keluaga	Perferition Subsparint/Solu- yang yang redicional diam periberdicional element befasilar	Rutang DAL DUM. Perwakdan BKIBN Pravinsi	Feventiae Penentitah Baerah yang memeriaatkan GBPs dalam penerapan peramentah rapesibahan peda perencanan	Perventase Nemah Data Kependadahan Parpama vang terbemak di Rampong RB
Metamorak BRL	Person	Person	Person	Verser		Person do	Person Humath Bata Repondudak- an Parpanna di Kampung
ş	\$	ş	10.2	4		5	2
198.0	3	3	10.7	3		100% Provid 213% Subfriess	š
10,215	g	R	17	R		100% Prack 27% Labyhora	ğ
10,214	8	8	n,	1		100% Prev8 15% kdb/hots	ğ
10,234	96	95	12.2			100% Provil 38% kalyhota	258
10,234	100	907	121	901		100% Front 45% satchons	ğ
					29,880,48		
					37,073.71		
					39,128,13		
					41,303.42		
						Bidang Pengendalan Pendudak	
						\$	\$

ş	1/3	¥	5			
				1		
				-		
100% prov6 50% kalchona	*	1000s prov A 500s kab/hora	68.0	ğ	100 % Prov 8,99 % Kab/ Kota	100% Prov & 45% kab/kota
100% prová 46% kaloňota	+	75% prov. 8 40% kalejčiota	54.0	á	10 % Provide 90 % Kulley Kota	100% Prov. 8.38% kalijûmia
100% provide 30% batcheta		prond NS NS Maliforn	81.0	ĕ	00 % Prov 10 & 79 % Kab/Sota	
provit 20% 20% katylenta		65% prov 8.20% kaltykota	88	- K	100% Prov. 100% Prov. 1009% Provide. 8 pc 9% 879 % 90 % Subt/Social Rub/Social Rub/Social	100% Prov. 100% Prov. 8.27% 8.33% kale/buts kale/bets
nove ton kab/bota	**	10% prov & 10% kalt/keta	45.0	ž.	100 % Prov & 53 % Rath/Kenta	JOD's Prov 8 21% knth/knta
2	2	2/0	979	4,6	2	
Person Penda Prostnd Rab/Ress	Jake (foresal, semiternal, danisformal)	Persentane Persentane Daerah	Person Kampang 18	Person Femda Kale/Nesa	Freshraf.	Pravins, Kals/Nesta
Seminara Salt/Torta	phononiasi an di provins	monistah n Sistem ni ni n Pendahak	Perenta ye Kangung 105 yang melak smakan peminganan terpada ina kependarahan	release and Ouzpur Stakons sest belishes pervedicial deregan pervendiciale daer and daten sergita pergendician kuantitas persantak	Cakepan penthinan penthinan whiskan dan whiskan dan whiskan pengentakan pengentakan (Penya uman (Penya uman (Fenya uman Grand Deagn. Fred Uparensetel dan Proyeksi Penshetiksi	Catapan koordinas integras indikator Program datam kebigisan pembagunan
Formulators Rocia Bunga Frantsi dan yang efektif	Categorini predidian Rependedak	Persentane doerah yang melaksanaka Peringatan D Pergenalaka	Present Strategy Septembly Special Spe	an' Output can penedi intah daes ndalan has	3	7
w.	+		61	angual Manad Manad Manad		

			T		
	I	I		I	
100%	100%	100% prov & 50% kab/kota	33 prov, 50% kab/kota	100% provinsi, 55% kab/kota	100% Prov, 90% Kab/Kota
10	71				
%56	%06	100% prov & 40% kab/kota	33 prov, 40% kab/kota	90% provinsi, 45% kab/kota	100% Prov, 80% Kab/Kota
	*	100% prov & 30% 30% kab/kota	33 prov, 30% kab/kota	70% provinsi, 35% kab/kota	100% Prov, 70% Kab/Kota
%06 	%08				
85%	70%	100% prov & 20% kab/kota	33 prov, 20% kab/kota	60% provinsi, 25% kab/kota	100% Prov, 60% Kab/Kota
	%	% 10% :ota		% nosi,	%, %, %ota
808	%09	100% prov& 10% kab/kota	33 prov, 10% kab/kota	40% provinsi, 15% kab/kota	100% Prov, 50% Kab/Kota
		rei			
		n. n.			
Data uduk- ng KB lah	Data uduk- ng KB		is a	ase	ntah
Persen Rumah Data Kependuduk- an di Kampung KB yang telah diregistrasi	Persen Rumah Data Kependuduk- an di Kampung KB	Per sen Pem da Provinsi Kab/Kota	Pemda Provinsi, Kab/Kota	Per sentase Pem erintah Daerah	Per sentase Pem erintah Daerah
:= 0.0	litasi an an di	lita si rja ana	.00	E	r an di
Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk dan diregistrasi	Cakupan fa silita si pengembangan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	Cakupan fasiitasi penggerakan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota	lumlah fa silitasi ke pemerintah daerah (provinsi dan sabupaten/kota) sabupaten/kota) pengimplementasi an kejasana pendidikan medalu 3 jalur pendidikan yaitu pendidikan yaitu formal,	Persenta se Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian	Persenta se Penerintah Daerah yang mendapatkan fa silita si pernaganan terpadu isu kependudukan di
1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8

			5	5	151	5	5				
			Batang 19900 Provinsi								
		422,332.A7									
		398,7103.84									
		376,683,43									
		355,866,63									
		325,883.05 35,866.45 376,483.43 398,76.148 422,312.47									
	SQ.		49.52	2	55.28	15.5	ŝ				
	\$		61.73	100	20.52	36.0	2				
	305		888	2	55.32	16.5	8				
	Ę		66.12	£ 5	2 7	17.0	R				
	\$61		計畫	22	22	17.5	s.				
			Su S.2 (Sunt alk fluitin 8 k9 B/k)	25	12.52 (PR)	17.5 (SKAP 2019)	27 (Pellon dan Fusdatio)				
	New serritare Mera Forja		Person	Nada (0-100)	Persen persenta kili	Persen	Person				
bersana mitra Netja	Fer seeka se elitra best ja yang mredispatikan fisuklara perebisaan perangaran terpada isa ferpada isa	Bidang RBKR Perwaldan DKKDN Provinsi	Persontare Estilize Reselution Cadenti very skep melayani ISI MCP	Indeks brownini Metado RB (Method Aptrosotion codes/MII)	Persona se besertuan 18 de Palaquaten/Pota dengan kesertaan rendah	Persenase Kohamilan Yang Tifak Dingsokan	Perunta in Polityatan 18 Perupensilinan				
	2		State of the state	Indeko RS (NA codeo)	Perse de Rab denga	Person Yang T	Param Param				
		£17.8	e.	4	e	7.	v.				

18.32	3	33216	ž	Problem Talental Kalah Kalah	8	15
61.72	40	55862	352	S Forky Tahuny Falky Rocks	H	470
2615	*	26572	336	4 Fools Tallous/ Kats/ Kota	9	320
21.99	R	23251	280	4 Frek/ Tohun/ Kab/ Kota	42	200
25.25	92	19929	¥	3-Freek/ Tahun/Kalle /Nota	:	120
30.32 (Seathers) Auth NRBHQ	2	1419	156 (Laporan Pervakilan Brotsk Provinsi	3 Frok/Tahun/ Kab/Yora	46. PK 2029s	N/A
Perven	Persen	Tenaga Reskhatan (Ramufatth	Provider	Gerak	Person	Katı/Kota
medali perngatan Akerdan Kaditas pelayanan Malif yang wasal dengan standar pelayanan	Personita vo rumali sakit yang pelayanan NB nya meningkat	Auntieh Tenaga Pelayanan meridapatkan fasilitas kongerend Barnuladi	Peningsatan Austan Provider Vasekteni vang Koropeten	Amildi Polayanan Marian III Bergerak/Bakii Sosial di Wenyali dan Sasaran Marian	Personta to PUS dergan kehamilan ri-sko tinggi (4 Terlaki)	Auntiah Kab/Kota dengan P88/PL83 yang Pedesmas di selayahnya melayani KB
metaki peringkatan akses kaditas petayanan SBMR ya dengan standar petayanan	11	23	22	41	12	7.6

75.00		SHE, DESCRIPTION OF SHEATERS TRESHELDS, ZHE, SHE, SHE			Hidang ADPIN			
8		SHELLI 247,432,12 278,545,48 281,245,48						
8		346.131 247.437.12 278;345.85						
8		(346.13 247,437,12						
8		(346.11)						
8		8						
8		242,701,522						
22	8.5		48.5	K	65.0	200	100	*
72.00	72.00		9.18	ę	75.0	ž.	9	2
6R.80	001100		354	19	76.0	6.19	8	*
60.23	82,00		312	8	650	472	MI.	7
62.08	80.53		938	ts.	0 00	308	100	x
SS, 86. (Sharinalk Rutin B (SPBN)	SS, RE Chartolik Bulin BistiSM		11.9	50 (SRAP 2019)	53.0	n	8	*
Person	Person		Person	Person	Person	sab/forts	Per sen Wilayah Proc dan Kab/Yota	Provins
Notion and Output: Non resoluted Referenciates Address of English The Presents or Stables The Presents or Stables The Presents or Stables	inestapat ketoroslass Aotos MCP	Bidaug ADPIN Permeklan Bidgin Postins	Ferentia es state holdent (perunaglar popurtingan dan nitra kerja yang berperan serta akif dalam pengelolaan Propam Banga Koncana	Persentase nassocidat vang terjangkan Program Bengga Kencana	Persentare Penyalah KB yang berkinerja balik	lamlah pengalakan Sistem Informasi Keluarga (SISA)	Preventow celepan perangest dan jaringan strem Teleoning dan strem Teleoning dan streman di Tr. Provinsi dan Kabapanen/Nota	Nelgor and Octool: Penggara dekara shakesaldar anta a penglaku masourakat benda satkan penglaku masourakat benda satkan shaka dan informasi yang benbais if dalan dan informasi yang benbais if dalan Program Rangga Mencana
Network Occ		F.1.4 Bit	- 63342	~ 2.2		205	v 7 7 7 8 6	Pergpetaloning Pergpetaloning locks verspetalon perfatu masonal data dari informa dalam Program for

	T		I	I		
	1		1	ı		
36.0	45.0	%02	%06	514	70 % Tim Advokasi provinsi dan Kab/Kota	12.0
34.0	43.0	%09	%08	411	60% Tim Advokasi provinsi dan Kab/Kota	12.0
32.0	41.0	%05	%02	359	50 % Tim Advokasi provinsi dan Kab/Kota	12.0
30.0	39.0	40%	%09	308	40% Tim Advokasi provinsi dan Kab/Kota	12.0
28.0	37.0	30%	%0%	257	30% Tim Advokasi provinsi dan Kab/Kota	12.0
25.6	35.4	20%	NA	NA	20 % Tim Advokasi provinsi dan Kab/Kota	
					Pro A	
Persen	Persen	persen	Persen	Kab/Kota	Persen	Frekuensi Kegiatan
yang di jut unit KKBN	se iaan Ilian c dan KB ta yang k Dinas	ke Eluasan Sangga sesuai isi,	tuasan E Sangsa dalam murunan	ntan n media am encana	se Tim Terpadu ttor 3angga yang	an Pryuluh Pan Jam A Prgram Prgram Prgram
Persentase Mou/PKS yang di tindaklanjut unit kerja di BKKBN	Persenta se Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kab/Kota yang berbentuk Dinas	Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi, sa saran dan	Persenta se penyebarlua san m ateri KIE Program Bangsa Kencana dalam rangka penurunan	Jumlah pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana	Persenta se Tim Advoka si Terpadu Lintas Sektor Program Bangga Kencana yang melakukan advoka si	Frekuensi pembinaan Kinerja Penyuluh KiB dalam pelaksanaan tupoksi dalam mengelola Prigram Bangga Kencana
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7

				Sasaran Registan Meninskatna	ponydongjara- an begotan polatikan, persektan dan pengenhang	and Prodms	
				F13	e.	~	Pendid
2	2	110	Ħ	_	Perver yangk kataga hali	Pergentar Pergentary Perstarya Representary Releasy B dynasian rang san B Program B d Program	III Nekaran/ Output tay Pendidikan dan Peluthun
Cakupan perahinsan MP dan nekantene namanand firi lapungan dalam pengantan Pengantan Pengantan Pengantan	Persontase Perreluin 18, PL 181 yang medakukan pendanaan kesertaan ber-18 dalam upasa memurankan BO	Personitase coloquen pengelobaen data dan informati Program Bangga Kencana	Cakupan kualitan Layanan kutegan STIK dam permeloaharan telom asi	Lafthang Perwakilan BKISN Provins	Personian poserta Diktar yang belis dengan kabugan baik dan senjat tian	harshir benefitar dan Pengenthangan Melanga Pendangana Melanga Megandadan dan Melanga Benecana yang Agarakan salagai inger rempasa Pelajawa Pongan Bangai Mercana di Prozesi	III Kelsarany Output Layanan Pendidikan dan Peluthun
Sub-Yora	Person	Kath/Nota	Person Wilayah Prov dan Esis/Rota		Person	taperam	Layanan
		100	100		п	n/o	1
514.0	0.09	100	3100		99		S.E.
518.0	65.8	81	100		52	#	(#.)
514.0	20.0	81	81	П	3	#	1
514,0	25.0	81	1001		¥	#.	-7.
514.0	9	100	100		R	#	2 <del>5</del> 2
				40,525,06			
				141,309.2			
				138,744.50 141,109,23 144,027.79 146,909,45			
				146,909.4			
			1		1	LALIBANG Provinsi	
				-	1/3	S.	

					heerin	Generik (Debunjan Mangemen)		Sekretaris. Utana
				1,200,591,				175,814
				3,025,976,				165,919
				2.854.035				136,588
				2,724,381	4			147,777
				2,516,233				138,465
14411	Э	S.F.	H		4.2	n:	*	
14411	:Z	(2)	27		2	97	77	
14411	(1)		9		5%	п	0	
14411	Э	8.83	эн		SE.	<b>20</b>		
8040	:#	9. <b>7</b> 9			7	in	0	
# 11	7	4/4	2		t,	*	0	
The O	layanan	Dekumen	laporan		Index (Seats 1-5)	dear for ja	Ment Social	
Jemish Tenaga Program yang mengkad Pendidikan/ Poladhan	(2) Kelsanan/ Oktost Layanan Perelitian dan Pengenibangan	lamish pemilian dan pergembanyan Propan Bangsi Pensara yang diskurakan	lemlah pebblasi Nazia tuki liniah (KTI) hasi (KTI) hasi perebbah Noberga Koperdalah dan Kobanga Berencana pada penal masienal/	Indikater Sasaran Program DKM:	Trighat begrassin (Indeks) Invento Debangan Manajemen Program Bangja Nemcana	Amelak tinit Kerja Bergeodkat Wilayah Bekavilari Kerapa (WBK)	Amilah hait Perja Bergeredkei Wilayah Bir dessi Bersh Melayani (WRBM)	Indibator Sauran Outcome (Turken I):
1	on dan P	17	27	Progra	Tingka Layana Manaj Rangp	Aumlah Bengare Bedara	Amilah ti Bergeedi Birdessi (MBBM)	Chatcon
	C21 Pare			2		n		6.1
				Sasaran Fragram DKM :	Mesingkatnya kualtus pengeldaan dakangan manajemen	dan tigas teknis birmya di lingkungan Bikisibi dalam mewujadkan	Femelintahan Yang Balk	Separan
				2				63
				Program Dahangan Managan	DESER			Sekretaria
				=				0

					\$	N/L	N/I	N.		
		70				Biro hakem, Organisasi Dan Humas (BHOM)	9			
				1,1991.53						
				3,783.51						
				1,580,67						
				3,388.52						
				3,006.79						
62.0	ALIM	2	4.0		25% dari Pragram togricos Bonzos	41	R	\$56	141	30
2	WITH	4.0	318		BHY dark Program (regrident BRODA	¥	и	38	14	12
97	W.	33	n		8255 idaci Program Legislavi BADBBN	a	Ŕ	938	(4)	20
HGS	4174	3.6	Z		S2N darii Pregram Legislavi NOOM	2	2	N. 26	15	R
0	ă.	3	9.0		E1s dari Program Ingilian people	3.7	3	% T6	in.	20
(Position (Position MenPANIII)	WITE	n	n/a		Petro dari Program Ingritori BARRIN	3,56	67,5	30.8		*/u
Indeks (Skala 0-100)	Opinia nerk	Level Maturitas 1-5	Indeks (State 1-4)		Person	Indess (State 1-5)	Misi Destrutus	Postant	Layanam	haviah Ron Kumulasi
Birdicas	Opies atas taperan kesangan dari BPK	Trigher maturities SP4P	Indeks Sistem Merit	Indikacer Kleenja Registran (Eselam II)	Ferontiae regulas yang merlahang dan dimerlahan untuk dimerlahan baditas pengriokan Propan Banggo Serama	Indek copsusion polyseum politik (konsultad, data dan reformad)	Milai of detectuara Solventhagasan	Persons or pembetham postif tertadap BKRNn	(1) Keluaran/Output: Layanan Pulum	hunteh regulasi/kebijakan yong dibutuhkan BERBN
Mark Mark	Spirit Resar	The	Indek		draw draw draw draw draw draw draw draw	polayeran polayeran (konsultad informet)	index.	P 8 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	oharan/O	17
-1	n	je.	+	6111	+		e	4	(1) Koh Puhus	
Mercepance kealtas daturgan manajenen dalam	penyelenggara an Pragram florega fencana			Saratean Registan (Fadon III)	Sawan Rogistan: Menujadam penyedian landa san hakan yang dapat diperjanakan diperjanakan	sebagai daur pergastan pelaksanaan Program Banga	foncard			
				6.113						
				aan dan nasi n	mean den M. sera Pengyeldom Ogarisasi dan Tatalakuma					
				я						

						1/h			
		70				Beo Umum (BBCIM)			
					149,576.1				
					141,120.8				
					133,144,2				
					125,619.0				
					11K,119.18 930				
æ	1001	50	-	100%		ä		ä	ž
æ	808	071	್ಷ	80%		7		8	3
3	NOS	123	5 <b>2</b> %	169		7	7	2	g
4	40%	901	·#	\$.0¥		я	3	g	×
:=	2606	×	+	20N		-23	+	8	8
1	10/4	10/19	7	n/a		3,17 (Tampa kehum asan)	7.	G!	*
Lityanan	Person	Jamilah Non Pamulahi	Ligation	bean		moths Chala 5.4)	Unideren	Person	Person
(2) Keksaran/Ontpot: Layanan Hilbungan Manjarakat dan Informasi	Persentase pembinaan Unit Peleyanan Publik BKBM	Aumlah fasilitas media massa terhadap pemberitaan HSDSM	(3) Kelsaran/Output: Lajaman Manajemen Organisak	Ferventiase Fasilizat Unit Serja dalam Pelaksanaan Bofesanaai Hindraat dan Zona Hingrias Wallasch Befor Korupol	Indikator Kinerja Kegiatan II selan III:	indeks kepusan pelapanan administra si perkantoran, pergelelaan saana pengelelaan asana pasanan pelanteran kempost si kehunauni	(1) Kelsonan/Output: Lasonan Umem	Persentase layanan kenumahtanggaan yang sesual standar	Persentase progelolaan keamanan dan ketertiban legbungan yang
sanan/Oor gan Mare asa	172	22	(3) Kelsanan/Outputt La Manajemen Organisas	1	_	person person person person person person	annan/Obt	1	2
(2) Keksan Hisbungan Informasi			(3) Yes Manaj		611.3	-	(1) Kets Unsum		
					Sewan Englisten (Esolos III)	Sasan Registan: Merujudan pelusunan administrasi perkantoran, kerumahlanga	an dan pengelolaan sarana	provents perkantaran yang berhaalitar	
					6.1.2				
					Pelaksmaan pelayanan administrasi	perkantoran dan kerumahtanga an yang cepat dan tepat			
				- 3	34				

SE.		9	<b>.</b>	100	3	#:	S=:	Ŧ	28.761	707	*
56	н	2	4	100	88	#	п	46	38.761	(1)	3
8	÷	8	*	100	986		-	2	78.761		я
12	2	26	2	100	38.2	í,	1	4	28.761	9	3.
08	#:	92	196	100	38.1	#	ĸ	9	27.375		¥
13	*	1//	=	901	88	Ħ.		и	28.761	a.e.	#
Ferson	Sayanan	Person	Layanan	Persons	Per sen	tayana	their	their	mg	Lavanan	hanlah unit kerja perun dan provinsi
layanan administrasi dan lesar span yang cepat dan seraai standan	(2) folkuraný Chipoti Layanan Protokoler	Personiase Invarian Reportologian yang idlabakan sociara tertib dan lancar	(3) folkuran/Chitput: Layanan Perkantoran	Reaksan pembayaran Gaji dan Tenjangan	Roafiasi prevedian layanan operadonal dan prevedharaan kamer	(4) Kohanan/Output Layanan Sarana dan Prasarana Mornal	lamish prequelam kendaram temotor	kenlah pengadaan penaktan fasiitas penkanteran	luan pembangunan/ rennad seding dan banganan	(5) felturan/Ozigur, Layanan Pemantasan dan bulkan	Junish pendinaan dan evaluas pelayanan administration dan perkanteran dan kenan ahringgaan
1	aram/Dat	z	arany Chat	=	a	anamy Curt	7	Ç	2	man dan	13
	(2) follows Protofoles		(3) followard Perkantoran			(4) Notes				(5) Neta	

		5	\$						
		Biro Kesangan Dan	BAN (BSUB)						
	16,538.47								
	9,553,23								
	9,401.16								
	MC088/8								
	8.189.00								
		2	E passit dan 33 prodesi	H	100	8	26		L payat dan 33 proseinsi
		g	1 puser dan 33 presdins	æ	100	8	4	-	1 puvat dan 33 provinsi
		38.0	Lpant dan 33 predne	.#	100	#	H.		L parat dan 33 provinsi
		ča.	Traval dan 33 percessi	1	100	R	7	9	1 perust dan 33 provinsi
		574	T puvet dan 33 provinsi	74	108	35	-	9	3 protect den 33 provincia
		- M-7	3 pest dan Naprasine	я	190	96 Formula Lona 1.2 Indikator)	4)	÷	3. perset dan 33 proxima
		Person	post dan provinsi	Unymon	Person	Person	Part of the same o	Dokumen	posit dan provinsi
hopat	Indikator Viner ja Registan (Evelon III:	Persentare Salker yang meleksanakan tatakeda kesangan dan BMN kesana dengan peratera sesan dengan (SAF, RPA dan kentah Dekermen AMN)	tentist gadava alokon gavat dan provinsi yang tidak mengalami atachasi dan overtrook	III) Kokuran/Output: Layanan Managemen Kouangan	Presentane Sador yang menyanan Laporan Rosangan semai SAP (6 Prinsip Absortana)	Persentase Persentase Pelaksanaan Anggaran Salker (1924)	(2) Koharan/Output: Layanan Menapenen Barang Milk Regara	lamlah Doğumen BMR yang tevsaji tepat wakta	lemlah Gedang Adokon yang Merencanahan dan Melekunakan Melekunakan Distribus Aloken ewan dengan 6
	Indikator 10 (Esston III)	Persent metabos hesungo sesuni d ponund dan hes MMN)	pusat c tidak n dan os	(1) Kokuaran/Output: La Manajemen Kouangan	1.1	7	avan/Out	17	22
	613	<del></del>	79	(11) York Manage			(2) Roth Manage		
	Sasaran Registan (Eselon III	Nawran Registor: Menujadkan pengeldian keuagan dan MM yang berkualiter							
	63.3	-							
	Peningkatan Su altan Pengelolaan	Notation dan							
	a								

				K/L				1/31	1/3
								Biro Kepegawalan	(RIPEG)
							5,152,58		
							4,872.25		
							4,607.78		
							4,358.28		
							3,922.91		
4	in .	(4)	Special dan 34 provinsi	9 parket days 33 provinsi	#:	900	100	7	90.0
	G G	(a)	9 posmi dan 34 provinsi	9 parent des 33 provinsi	ä	0.88		9	99.0
ä	G	(a)	9 pusat dan 34 provinsi	Spurant day 33 provins	4	0 8		ą	30.0
5	ং	ा	9 persal dan 34 provinsi	9 posati dan 33 provins	5	87.0		4	65.0
+	্যী	্ৰে	9 meal dan 34 provinsi	9 posst dan 33 provins	#	88.0		6.4	0.09
*	ী	-	9 pust dan 34 proxinst	9 puset dan 33 provinsi	20	90.0		3	8
Dayanan	their	Cayanan	paser dan provinsi	proof dan	Layanan	Persen		Indeks	Person
(3) Kebanan/Output: Cayanan Sarana dan Prasarana Internal	Armiah prengadaan prengalah data pengalah data dan komunikasi	(4) Rehaman/Output: Layanan Pemantauan dan tvalsasi	lamish saker yang mendapatkan Pembinaan Mentoring dan Evaluasi Pengelokan Pengelokan Banis	landah Sather yang mendapakan pelayanan Pengadam barang dari jesa	(5) Rehammi Chapatti Layanan Umumi	Previous Sother yang medakasahan Pengaban Barang dan Jasa sesual penaturan perendangan	Midikator Kinerja Kagiatan (Esebe 10:	Mdeks Kopuasan Layanan Kepegawaian BRISH	Persentase perenapan syanajemen pengenbangan talenta ASM BASIM (management rolent)
dan Pras	9	saran/Os tauan da	51	d and and and and and and and and and an	aman/De	ц.	(E selo	Negati Repres	Persent avanaje pengen ASM BK
(3) Kell Sarana		(4) Kell Peman		-	(S) Nets Onesem		6.3.4	4	*
				Sayaran Kegiatan Menujudkan Pengelolaan Pengadaan Barang dan	ne sebue o		System 5 Kegistan 5 Eselon III	Sasaran Kegjartan: Moningkatnya	bualtuv pergelokan layanan bopegawalan dan
				~			614		
							Pergelokaan Samber Daya Manesia	Aparatur Spil Negara (ASN) BROSIN	
							26		

			Г	5					
				Hiro Perorizanaan (HIRER)				Irrgoskharat	Chama
			6.548.05				20,303		
			6,188.73				19,513		
			5,889.W				18,710		
			\$1239.95				16.896		
			5,028.25				6,450		
-	п	nu e		•	(4)	٠		in	0.03
948	828	000		m	æ	Si .		¥	90'0
11#1	e	2000		H	( <del>) (</del> )			н	100
Viet:	- 1	46.0		<b></b>	Wat	4		7	90'0
848	N	98.0		m	(4)	ě		#	0.09
(表)				*	0. <del>11</del> .	œ		1/0	6.12
Layeran	Layeran kopinganalan	Powers		Dolumen	recenter)	Ооветен		UR Recta	Persen
Kelearan' Durput-Layanan Manajersen Sunder Daya Manusia	Berdah Jayanan Repegawalan Berbasis elektronik	Presenta ve data ASN datare Toleropoor	milkater Kinerja Kegistan. Esekin III:	harish dakanen Perceizaan Pongun dan Augalan seng mengaci pada pendekatan beragia pendekatan peda pengelagan menengal, pengangan tenpada dan behasis kinenja	Kelawari/ Oxtout Leyanan Perencanan	temlah ketajakan perencanaan Program dan anggaran yang abanam	Inditator Several Outsome Custonia	Sertificasi ISO 37001	Perventare Nationalities Tennan Ekstema Inchalap anggaran INSDN
alement Sur	#	2	-	Mandah Perenca dan Ang pengah pengah pengah pengah pengah pengah pengah pengah pengah	Reluceary Outp	1	notite Outsi	3	Tenuar Tenuar terhada monto
			811.5	a .	Kedu.	*	12	*	×
SDM Aparatur Spil Megara (ASN)			Sesaram Registran 6 E selon III:	Sawram Registant Makeingkannya Maditas presentana Program dan anggana yang mengan pada presedekan Persendan	pergoluscan jergka menengah, penganen centak dan	Destards Mineria	Sasaram Outcome (Eselon fil	Meningkatnya akuntabilias acundoloso	Program Rongga Sencara
			63.5	11			7		
			Pergustan Perescansan Program dan	Anggaran			Impostural Utama		
			22				=		

		1/3	Ş					
		hunditoral	Wilspah 1 (ITWIL II					.0.
	6,693.26							
	6,433.90							
	6,170.34							
	15.695.3							
	2,757,65							
Level 4		44	SE 0	я	42	70.0	A CLOS, and kerjal	100
(exercise) (exercise) (exercise)		180	10	9	4.0	0.09	(5% umit kerja)	8
(Learnery ACOS) In parent Property		90	000	14	2	2009	BB (20% unit kerja)	8
Activities of special states o		*	8	7	3.6	40.0	H ISN H IN	2
Learning action of the second		7	Sta et	1	34	9006	9 (100% unit kes (s)	B
*		0	2110	1	×	200	Ę	\$
lowed Kapabilities		Unit Serja	Person	Layeran	Level Unit Kerja	For sen Unit Roy is	For sen Unit For ja	Por sentave 550 dan SACM
Level Supstitition APE (IACM)	Beilketor Kinerja Registan. (Esekin III)	Jumish Unit Kerja Wilayah Liberpredikat Wilayah Bobas dari Kerupai (MIBK)	Persentaso Materialitas Ternaan Eksterna Terhollop Anggaran Saber di Wilayah I	Solumany Delport Leganan Audit	Level Maturities Perulajan Mandiri Perupebenggaraan SPIP Unit Kerja Witarjah I	Persentase Unit Kesja Percentuhan 23- VéR di Wilayah i yang Lelon TPI (Tan Pental Batemal)	Nibs Hast Evalued Implementad SAKE Unit Kerja Wilayah I	Persentation Capalan Indikator Peningkatan Manajemen Pengawasan
Sarred Sa		Mental Libergu Biobos	Fernal Temas (Fehal) di Wila	can/ Dutpo	1	12	2	17
*	1177	a .	n	Eduara				
	Sewiran Keglatan It salan ili	Saszan Keglatan: Meningkatnya penganianan internyana	elektif dan elesien turhadap pengeloluan Program	Bangor Kencana di milayah I				
	H113							
	Peningkatan akuntabilitas penpelolaan	Program Bangja Kercana selayah i						
	238							

		5	5							
		Manager	Willagah II (ITWIII, II)							Inspector of Willayah III (ITMII III)
	6,812.58									67.787.73
	6,546,27									6,532.45
	6,278,35									626132
	5,669,53									\$,657.22
	2,452.00									2,810.40
TOP 100% TPS 90%		4	98.0		ą	70.0	A CLOS chos kersal	8	1005 1008 TPS 90%	
TDF 100% TPS 45%		140	90'0	141	97	60.0	A (55% und) kerpi	ş	TOP LIDES TPS ASS	
TUP 180% 195 80%		l'as l	0.07	4	3.8	9 15	28 E E E	g	10P 100S TPS 80T	
1005 1005 175 258		(6)	90'0	-	3.6	D 05	88 [1558 and benjag	2	10.P 10.00s 175 25%	
TDV 100% TPS 70%		*	60'0	*	25	0.00	in (100% and berjal	9	70F 100S 11TS 20TE	
ě		a.	0.12	S#1	72	200	12.8.	ž	ž	
Persontare		Unit Nerja	Person	tayanan	Level Light Kerja	Potrane Unit Sorge	Person Unit Kerja	Personiane ISO dan JACM	Persentase	
Personas IIH Gisternal dan Intern di Wazah I	Indikator Kinerja Kogjatan (I selen ili)	Aurelah Unst Resp Wilayah Hilbergo esikat Wilayah Hoba's dari Korupsi (WIRK)	Persentas Materialina Temana tastema techadas Angaran Sation di Whayah S	Network Output: Layeran Audit	Level Maturitus Pendulan Mandin Penyelonggaraan SPIF Unit Kocja Wilasob II	Persona se Unit Rerja Percentatun 23- WWK di Willsych II WWK di Willsych II Wang Lobes TPI (Tim Peeslas Innernal)	Nilai Hodi Evaluasi Implementari SAUP Unit Kerja Wilayah II	Personia se Capaian Indiketor Peningkatan Manajemen Pengawasan	Persona o Tolf External dan Internal Waqah II	Indikator Kloerja Keglatan (Eselan III:
1	_	Amilia II Berp Bobas	Fersen Temas techad di Wha	in/ Output	7	2	1	2	2	Indikator A (I selan lik
	1012	# ·	~	Network						ET.
	Sasaran Rogintari ITselon II)	Sasaran Kegiatan Maningkatnya Penganasan Intern sana	efektif dan ofision terhadap pengolokan Program	Bangsa Kencana di wilayah II						Sararan Registan If salon III:
	H13									K13
	Peringkatan akantabiltan pengelokan	Frogram Banga Kentana wilayah II								Peningkatan akuntabilkas pengelalaan
	£									96

5	5								
									Solvetariat Provins
								X,004,874,	3,000,177.
								2,840,545,	2,837,057.
								2,999,314. 2,5390,707. 2,6816,792. 2,990,545.	2,556,60% 2,685,453 2,837,057, 65 67 91
								2,350,707,	2,556,603.
								2,368,314,	2,366,386. 20
100	9719	*	2	70.0	A USA de la	108	TDP 100% TPS 30%		
	970%	7	0.4	009	(5% unit Kerjal	\$	TOP 100% TPS IDSS		
1/26	(0.0)	至	ā	50.0	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	10P 100% TF5 B0%		
1.7.	8		3	40.0	SE (15% All life Market	55	100% 100% 175.75%		
	60.00	1	2	30.0	B (100% and kerjal	98	TOP 100% TPS 70%		
(A)	612	#1	7	20.0	12%	2	2,70		
Unit North	Person	(alona)	Level Unit	Person Unit Kerja	Person litral Kerja	Persentase ISO dan IACM	Persentase		
amiah Unit Resp Wilayah III Berpredikat Wilayah Bebas dari Korapel (WIRI)	Persentario Materialinas Temuan Eksternai terhadap Angjaran Soliter 6 Wilayah III	Reliant Audit	Level Manufas Penialan Mardin Penydongaraan SPP Unit Kerja Walayah III	Ree ja Ree ja Precentohan 21- Wells of Wilayah III yang tohos IPI (Tim Pendia)	Mile Hadi Endead Implementad Satir Unit Kerja Wilayah III	Persentase Capalan hidisator Peringkatan Manapanen Pengawasan	Preventase TLIP Eksternal dan Anternal di Witayah III	Indikator Kieseja Rogistan di 33 BRBB Provinsi (33 anii Curion Il Provinsi)	Solventaries Percential
Medas:	Persentane M Temuan Ekse terhadap Ang di Wilayah III	n/ Output	1	77	ជ	:	2	de 33 Di perit Co	Suda esta B KKERN
	~	Relate at Internal						7	171
Savaran Kegiatan: Meningkatnyo penganasian internyang	efoktif dan afrian terbadap pengoloksan Frogram	Bengga Yoncana di wilayah III						Season Control of St. Beginning Colonial Colonial Colonial Reported Colonial Reported Colonial Colonia	
								n	
Program Bangsa Rencana wilayah III								Polakisman Dakungin Manajemen di Pervisikan BKRBII Prodos	
								g.	

	an delangen Manajemen dalam pengeldaan	Regerdichtan, 18, dan Pembangatan Relanga di Pravins							
*:	(1) Kelus Dakanga		(2) Keluaran) Porkantoran			Control of Sanatra d		IIV	
Frontial (Series gal/901 dan percelibaran	aran/ Out	=	arany Out oran	17	2	dan Prasa	Ħ	33	7
Fraction (Semants psi/901 den percelharantutin/902)	(1) Nohamany Output: Layanan Dakangan Munajemen Salker	hartish persydenggaraam Manajessen di Rovinia Rovinia Recornina Recornina Referencentam, Kepegawalan Gatan, dan Orata)	Q3 Keluaran/ Output: Lapanan Perkanteran	Realises pembayaran Gaji dan Tenjangan	Roafisasi perredisan Isotran operasional dan perredisaran karder	(3) felularany Output: Lepanan Sarana dan Prasarana Internal	Auntiah pengadaan kondaraan bermotor	Avetlah pengadaan perangkat pengolah data dan kemusikasi	Amilah pengadaan perakatan fasilitas pedantuan
ą.	Cayaman	Beson	Cayanan	Persen	Persen	tayanan	š	unde	test
B.	#:	а	-	BOT	100	н.	13	12	z
2	н	ä	-	100	100	+	101	*	
a	46	2	-	100	001	÷		¥.	
п	77.	а		100	8	77.	(/ <u>P</u> )		
'n	*	ä	5 <b>7</b> 5	100	100	7.	10	*	*
2	+	a	5 <del>3</del>	100	001	#	2	1	- 1
1/2				-					

		K/L		
		Pergawann Provinsi		
	3,696.62			
	3,487.38			
	3,289.98			
	3,103,76			
	2,928.07			
10.156		85.0	1	100% 100% TPS 90%
10.156		82.0	1	TDP 1,00% TPS 85%
10.156		79.0	1	100 to 100%
10.156		977.0	1	100 K 100 K 175 75 K
R.156		8.57		TD# 100%
12.672		n/u	п	u/a
22		Indoka	Layanan	Tenuan yang ditindaklanju ti dan dinyatakan 'Selesui'
Luas pembangunan/ resorra si gelang dan bangunan	Pengawasan Perwakilan BKIBN Provinsi	Indeks ZI WBK	Keluaran/ Output: Layanan Audit Internal	Personia so Tenuan Estemal dan Internal yang telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan "Seleval"
8,		Ē	ran/ Out	1
	711		Keluarar Internal	
		Sa saran Keglatan: Mewujudkan akuntabilitan pelakunaan	pengawasan lainnya di provinsi	

Matriks Kerangka Regulasi Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi danlatau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Harmonisasi UU No. 52 Tahun 2009 dengan UU No. 23 Tahun 2014 terkait dengan Kelembagaan Program Bangga Kencana di daerah Provinsi dan Kab/Kola serta pengualan Program Bangga Kencana di Desa	Dukungan untuk:  a Kelembagaan Program Bangga Kencana di Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip otonomi daerah b Penyelenggaraan Program Bangga Kencana di Daerah, baik fingkat Provinsi, Kabupaten /Kota, maupun Desa c Penguatan implementasi Program Bangga Kencana oleh tenaga lini lapangan	Biro Hukum, Organisasi Dan Humas	- BKKBN - Kementerian Dalam Negeri	2021
2	Peraturan Bersama atau MoU antara Kepala BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terdinggal, dan Transmigrasi tentang Penguatan Program Bangga Kencana di Desa	Dukungan untuk:  a UU No. 6 Tahun 2014 terkait sistem pemerintahan desa yang mengambarkan posisi yang equal/selara antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dan pengelda desa sebagai organ pemerintah dan organ kemasyarakatan. Dalam hal ini, model kelembagaan untuk mendukung Program Bangga Kencana harus menyesuaikan dengan desain pemerintahan desa. Kelembagaan yang masuk dalam lingkup local self government agar keseluruhan program akan mendapatkan dukungan politis dan operasional dari pemerintah desa.	- Biro Hukum, Organisasi Dan Humas - Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga - Direktorat Bina Lini Lapangan	- BKKBN - Kementerian Da'am Negeri - Kementerian Desa	2021

	В	Tenaga lini lapangan yang memiliki kualifikasi sebagai perencana, pelaksana dan sekaligus penggerak. Tenaga lini lapangan harus dapat bekerja selaku birokrasi Program Bangga Kencana dan sebagai role model yang mampu menggerakkan polensi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara optimal. Kemampuan komunikasi dan negosiasi dengan kepala Desa, perangkat Desa dan tokoh masyarakat akan menjadi titik kekuatan keberhasilan program. Oleh karena itu, tenaga lini lapangan harus diberikan dukungan terkait dengan posisi kelembagaan program dalam perangkat desa sebagai kelembagaan pemerintahan desa		
		sehingga kinerja para tenaga lini lapangan dapat dijalankan secara profesional, terencana, terukur serta memiliki dampak terhadap kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.		

			ı
b	Penegasan komitmen dan		
	dukungan pemerintah pusat dan		
	daerah terhadap kebijakan		
	Program Bangga Kencana yang		
	masih relatif rendah. Diperlukan		
	regulasi untuk meningkatkan		
	pemahaman pemerintah pusat dan		
	daerah tentang Program Bangga		
	Kencana, sinergitas kebijakan		
	perencanaan program dan		
	penganggaran yang terkait dengan		
	Program Bangga Kencana di		
	dalam perencanaan daerah, dan		
	peraturan perundangan yang		
	mendukung penguatan		
	kelembagaan		
C	Penguatan koordinasi		
٠	pembangunan Program Bangga		
	Kencana dengan program		
	V 1 V		
	pembangunan lainnya, antara lain		
	koordinasi dengan program		
	bantuan pemerintah seperti		
	Program Keluarga Harapan/PKH,		
	Jampersal dan SJSN Kesehatan,		
	serta penanganan atas kebijakan		
	pembangunan Program Bangga		
	Kencana yang selama ini masih		
	bersifat parsial.		
d	Penerbitan Peraturan Presiden		
	tentang Pedoman		
	Penyelenggaraan Perkembangan		
	Kependudukan dan Pembangunan		
	Keluarga yang merupakan		
	amanat/perintah dari Pasal 14		
	Peraturan Pemerintah 87 Tahun		
	2014 tentang Perkembangan		
	Kependudukan dan Pembangunan		
	Keluarga, Keluarga Berencana,		
	dan Sistem Informasi Keluarga.		

6	Peraturan Bersama atau MoU antara Kepala BKKBN dengan Kemenpan RB dalam rangka peningkatan profesionalitas tenaga lini Iapangan KB di Desa.	Sinkronisasi UU No. 52 Tahun 2009 dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam memperkuat basis program di tingkat lini lapangan sangat diperlukan mengingat sasaran terdepan dan wujud keberhasilan Program Bangga Kencana adalah pada tingkat lini lapangan yakni di perdesaan. Strategi untuk meningkatkan partisipasi kelembagaan di desa juga harus menyesuaikan kebijakan nasional di desa yang dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 2014.	- Biro Hukum, Organisasi Dan Humas - Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga - Direktorat Bina Lini Lapangan	- BKKBN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2021
7	Peraturan Kepala BKKBN Tentang Sertifikasi tenaga Penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang memperhatikan penjenjangan/pengembangan kompetensi sesuai tuntutan program dan memperhatikan pemerataan distribusi tenaga PKB/PLKB di desa.	Tenaga Penyuluh KB/PLKB yang merupakan PNS/ASN memiliki fasilitas untuk meningkatikan kapasitasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 52/2014. Dari kelentuan Pasal 11 tersebut menunjukkan bahwa adanya tuntutan bagi ASN untuk bekerja secara professional dan berkudifas. Oleh karena itu, diperlukan setrifikasi tenaga Penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang memperhatikan penjenjangan/ pengembangan kompetensinya.	- Biro Hukum, Organisasi Dan Humas - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bangga Kencana - Direktorat Bina Lini Lapangan	- BKKBN	2022

	Tentang Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan agar program- program Bangga Kencana dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rancangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Bangga Kencana BKKBN yang intinya sebagai acuan dan pedoman kerja bagi OPD Bidang Dalduk dan KB yang menangani bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota namun belum mengatur secara teknis tentang bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan. Untuk itu perlu disusun Penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Kepala BKKBN Tentang Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana da Tingkat Kecamatan agar program-program Bangga Kencana dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rancangan dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.	Humas - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bangga Kencana		
--	---	--	---	--	--

9	Harmonisasi regulasi lentang Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan dengan Peraturan Menteri Da'am Negeri Repubik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	Menteri Dalam Negeri sebagai kementerian yang membawahi organisasi pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan teknis tersebut dibentuk atas perintah Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (8), Pasal 28 ayat (5), Pasal 21 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam menyusun regulasi tentang Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di Tingkat Kecamalan dipertukan harmonisasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah agar tidak ada kontradiksi antar peraturan.	Biro Hukum, Organisasi Dan Humas	- BKKBN - Kementerian Dalam Negeri	2024
---	---	---	-------------------------------------	------------------------------------	------

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO